

1996

A

131

Kerajaan

ISLAM NUSANTARA

Abad XVI & XVII

*Oleh :
Drs. M. Yahya Harun*

Penerbit
KURNIA KALAM SEJAHTERA

BIBLIOTHEEK KITLV



0151 0302

145737594

Kerajaan

ISLAM NUSANTARA

Abad XVI & XVII

Oleh :

Drs. M. Yahya Harun



Penerbit
KUSNIA KALAM SEJANTRA

1 1996 A 131

Kerajaan ISLAM NUSANTARA

Abad XVI & XVII

Oleh :
Drs. M. Yahya Harun



Penerbit
KURNIA KALAM SEJAHTERA

ISBN : 979 - 8598- 01- 8

**KERAJAAN ISLAM NUSANTARA
ABAD XVI DAN XVII**

Oleh

Drs. M. Yahya Harun

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-undang

Cetakan Pertama

Djulhijjah 1415 H/ Mei 1995 M

Design Sampul

Sigit Ariansyah

Penerbit

KURNIA KALAM SEJAHTERA

Dicetak Oleh :

PT. KURNIA KALAM SEJAHTERA

Mataram Bumi Sejahtera 28Condongcatur Yogyakarta 55283

Tel./Fax. (0274) 881425

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Bismillaa hir-rohman nir-rohiim

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya pula-lah kami berhasil menyajikan buku yang berjudul "KERAJAAN ISLAM NUSANTARA ABAD XVI DAN XVII" ini dihadapan para pembaca.

Buku ini kami susun dengan harapan semoga dapat membantu para pembaca dan para pencari ilmu untuk mempelajari sejarah kerajaan-kerajaan Islam di nusantara, khususnya pada abad ke-16 dan ke-17.

Dengan tersusunnya buku ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama Penerbit yang telah sudi mempublikasikannya.

Akhirnya semoga jerih payah dan amal kebaikan mereka semua mendapatkan imabalan pahala yang setimpal dari-Nya. Amien.

12 Robiul Akhir 1415 H

Yogyakarta,

17 Oktober 1994 M

Oleh

Drs. M. Yahya Harun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	7
I. KERAJAAN ACEH DARUSSALAM	
A. Latar Belakang Berdirinya	11
B. Masa Kejayaannya	13
C. Masa Kemundurannya	15
D. Sistem Politiknnya	17
E. Partisipasi dan Peranserta Ulama	19
F. Hasil Karya Ilmiah	20
II. KERAJAAN MATARAM	
A. Latar Belakang Berdirinya	23
B. Masa Kejayaannya	25
C. Masa Kemundurannya	27
D. Sistem Politiknnya	28
E. Peranan Ulama dan Partisipasinya	30
III. KERAJAAN BANTEN	
A. Berdiri dan Perkembangannya	33
B. Sistem Politiknnya	40
C. Kedudukan dan Peranserta Ulama	44
IV. KERAJAAN PALEMBANG	
A. Latar Belakang Berdirinya	45
B. Masa Kejayaannya	46
C. Pemerintahan, Ekonomi dan Politiknnya	47
D. Peran Ulama di Kesultanan Palembang	48
E. Masa Kemundurannya	49

V. KERAJAAN TERNATE	
A. Asal-usul Kerajaan Ternate	53
B. Situasi Kerajaan Ternate	54
C. Hubungan Ulama dengan Rakyat	57
VI. KERAJAAN TIDORE	
A. Asal-usul Kerajaan Tidore	59
B. Aktifitas Islamisasi Raja	60
C. Kerajaan Islam Tidore dalam Perspektif Indonesia Timur	61
D. Peran Ulama	61
E. Hubungan Tidore dengan Asing	62
VII. KERAJAAN MAKASAR	
A. Masa Timbulnya	65
B. Masa Kejayaannya	67
C. Masa Kemundurannya	67
D. Sistem Politiknya	68
E. Peran Ulama	69
VIII. KERAJAAN BANJAR	
A. Asal-usul Kerajaan Banjar	71
B. Sistem Pemerintahannya	74
C. Sistem Sosial Ekonominya	76
D. Sistem Budaya dan Agamanya	79
E. Peranserta Ulama	83
IX. KERAJAAN JAMBI	
A. Latar Belakang Kerajaan Jambi	85
B. Sistem Politiknya	87
C. Struktur Ekonominya	88
D. Reaksi Jambi Terhadap Kolonialisme Belanda	89
E. Jaman Keemasannya	89
F. Masa Kemundurannya	90
X. SANTRI DAN ABANGAN DI JAWA	
A. Penegasan Istilah	93
B. Asal-usul Santri dan Abangan	94
C. Praktek Keagamaan Santri dan Abangan	96

I

KERAJAAN ACEH DARUSSALAM

A. Latar Belakang Berdirinya

Salah satu dari sederetan nama kerajaan Islam terbesar di Indonesia ialah kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini berdiri pada tanggal 12 Zulqaidah tahun 916 H/ 1511 M. bersamaan dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis.¹

Sebenarnya tatkala orang-orang Portugis mulai menginjakkan kaki di Malaka awal abad ke-16, Aceh masih merupakan kerajaan taklukan kerajaan Pedie, yang terletak di Sumatera Utara, akan tetapi berkat jasa Sultan Ali Mughiyat Syah Aceh akhirnya mampu melepaskan diri dari pengaruh Pedie dan menjadi kerajaan yang berdaulat penuh,² dan bahkan pada babak berikutnya Acehlah yang kemudian menjadi sentral kekuasaan di wilayah Sumatera Utara tersebut: Pasai, Daya termasuk pula Pedie yang dulunya menjadi kerajaan atasan Aceh.

Karena keberhasilannya, melepaskan Aceh dari pengaruh Pedie, maka Sultan Ali Mughiyah Syah yang juga terkenal dengan sebutan Sul-

¹M. Yahya, *Sejarah Masuknya Islam di Indonesia*, Yogyakarta, 1986, hal. 6. Menurut Sartono Kartodirdjo berdirinya Aceh tahun 1514.

²Sartono Kartodirdjo, Mawarti Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, t.k., 1975, hal. 316.

tan Ibrahim menjadi penguasa pertama (1514-1528 M.) sekaligus sebagai pendiri kerajaan Aceh Darussalam.

Di bawah kepemimpinannya, Aceh terus melaju ke arah sukses yang semakin gemilang; baik dibidang konsolidasi politik, ekonomi atau ekspansi (perluasan wilayah). Dalam menjalankan ekspansinya, disamping bermotifkan politis, ekonomi juga tidak bisa dipungkiri adanya motif agama. Hal ini dapat dilihat ketika kerajaan yang baru keluar dari embrionya itu mengadakan penyerbuan ke Pedie yang telah bekerja sama dengan Portugis (non-Muslim).³

Sepeninggal Sultan Ali Mughiyat Syah, jalannya pemerintahan dilanjutkan oleh Sultan Alauddin Ri'ayat Syah. Pada masanya ekspansi terus dilaksanakan sebagaimana pendahulunya. Untuk meluaskan wilayahnya ke Barus ia mengutus suami saudara perempuannya yang kemudian oleh Sultan diangkat sebagai Sultan Barus.

Setelah Sultan Alauddin Ri'ayat meninggal dunia, ia diganti oleh salah seorang putranya yang bernama Husein. Padahal sebelumnya dua orang putranya yang lain masing-masing telah diangkat sebagai Sultan Aru dan Sultan Pariaman dengan sebutan Sultan Ghari dan Sultan Mughal sehingga tampilnya Sultan Husein menggantikan ayahnya itu menimbulkan rasa cemburu dan tidak suka saudara-saudaranya yang berkedudukan di Aru ataupun di Pariaman. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Sultan yang berkedudukan di Barus.⁴

Sebagai akibatnya maka terjadilah perlawanan dari ketiga Sultan tersebut terhadap Sultan Husein. Dalam pertempuran itu Sultan Husein gugur, demikian pula Sultan Aru. Sehingga yang tinggal hanyalah Sultan Pariaman.

Semenjak kematian Sultan Alauddin kemudian diganti oleh sultan-sultan berikutnya, Aceh mengalami kemunduran; banyak daerah yang tadinya berada dibawah pengaruhnya melepaskan diri akibat kurang intensifnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh sultan-sultan pengganti Alauddin dan pengaruh penetrasi Portugis. Baru setelah Sultan Iskandar Muda tampil sebagai penguasa Aceh keadaan bisa pulih seperti sedia kala, bahkan lebih memperluas lagi daerah taklukannya.⁵

³Ibid., hal. 317.

⁴Ibid., hal. 318.

⁵Ibid., hal. 345.

B. Masa Kejayaannya

Setelah sekian lama Aceh Darussalam tampil di pentas kesejarahan Nasional dan setelah matang dengan berbagai ujian sejarah (secara alamiah) maka sampailah ia pada suatu masa yang membuat orang merasa silau memandangnya atau menaruh hormat oleh karenanya. Itulah masa keemasan; masa kejayaan yang merupakan buah perjuangan dari titian roda sejarah.

Adalah Sultan Iskandar Muda yang telah menghantarkan Aceh Darussalam kebabak kegemilangannya sekaligus mengembalikan daerah-daerah yang telah melepaskan diri dari pengaruh Aceh akibat pertikaian antar pewaris tahta sepeninggal Sultan Alauddin Ri'ayat Syah di akhir abad ke-16 Masehi serta adanya serangan Portugis yang berkedudukan di Malaka.

Tampilnya Sultan Iskandar Muda (1607 - 1638 M.) menandai aktifnya kembali Aceh, terutama dalam usaha membendung penetrasi dan campur tangan pedagang asing. Dalam upaya ia menempuh jalan mempersulit dan memperketat perijinan bagi pedagang asing yang hendak mengadakan kontak dengan Aceh. Ia hanya memberi kesempatan salah satu nama yang lebih menguntungkan raja antara Inggris dan Belanda. Pernah ia memperkenankan kemudian Belanda untuk berdagang di Tiku, Pariaman dan Barus tetapi hanya berjalan masing-masing dua tahunan.

Sultan Iskandar Muda, yang memerintah hampir 30 tahun lamanya, disamping telah berhasil menekan arus perdagangan yang dijalankan oleh orang Eropa juga telah mampu membenahi dan mengadakan konsolidasi di berbagai sektor; baik ekonomi, politik, sosial budaya dan kehidupan beragama.

Di bidang politik misalnya, ia telah berhasil mempersatukan seluruh lapisan masyarakat, yang disebut dengan kaum; seperti kaum Lhoe Reotoih (kaum Tigaratus), kaum Tok Batee (orang-orang Asia), kaum orang Mante, Batak Karo, Arab, Persia dan Turki, kaum Ja sandang (orang-orang mindi) dan kaum Imam peucut (Imam Empat). Begitu pula pada masanya telah tersusun sebuah Undang-undang tentang tata pemerintahan yang diberi nama Adat Makuta Alam; hukum adat ini didasarkan pada hukum Syara'.⁶

⁶*Ibid.*, hal. 250.

Dibukanya Bandar Aceh menjadi Pelabuhan Internasional merupakan langkahnya yang progresif dalam upaya memakmurkan perekonomian negeri, sebab dengan open sistem tersebut segala hasil kekayaan Aceh, terutama lada, bisa secara mudah memperoleh pasaran walaupun pada akhirnya menjadi bumerang bagi Aceh itu sendiri.

Di sisi lain kemajuan telah diperoleh oleh Aceh dalam bidang ilmu pengetahuan dan keagamaan. B. Schiere dalam bukunya "Indonesian Sociological Studies" mengatakan : "Aceh adalah pusat perdagangan Muslim India dan ahli fikirnya (kaum cendekiawan dan ulama-ulama) berkumpul sehingga Aceh menjadi pusat kegiatan studi Islam.⁷

Lembaga-lembaga kajian ilmiah tersebut terdiri atas :

1. Balai Sertia Ulama' (jawatan pendidikan)
2. Balai Jama'ah Himpunan Ulama' yang merupakan studi club yang beranggotakan para ahli agama.
3. Balai Sertia Hukama' (Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan).

Adapun lembaga pendidikan yang terdapat di sana, meliputi :

1. Meunasah (Ibtidaiyah)
2. Kangkang (Tsanawiyah), untuk tingkat ini belajarnya di masjid dan yang dipelajari adalah kitab-kitab Ilmu Hisab, Al-Qur'an, Ilmu Falaq, Fiqih dan Hadits.
3. Daya (Aliyah), tingkat ini berpusat di masjid-masjid besar.
4. Daya Teuku Cik (Perguruan Tinggi), di sini diajarkan Tafsir, Tasauf dan lain sebagainya.⁸

Ilmu Tasauf (misticisme) adalah salah satu kajian keagamaan yang mendapat perhatian oleh Pihak Sultan sehingga pada masanya tercatat banyak ahli sufi, diantaranya: Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Sumatrani dan Nuruddin ar-Raniri. Untuk yang terakhir ini kurang mendapat simpati dari Sultan Iskandar Muda.

Dapat dibayangkan betapa gemilang Aceh Darussalam di masa keemasan yang dibimbing dan diarahkan oleh Sultan Iskandar Muda. Ini merupakan suatu indikasi betapa suatu usaha itu bila diupayakan dengan segenap perhatian dan keseriusan akan membuahkan hasil yang cukup menyilaukan. Maka wajar jika Aceh saat itu menjadi batu sandungan bagi imperium Barat yang berusaha mencengkeram seluruh wilayah Nusantara secara utuh ; baik itu Belanda, Inggris maupun Portugis.

⁷Ibid., hal. 258.

⁸Harun, *Op.cit.*, hal. 7 - 8.

Sungguh sangat disayangkan, diakhir masa jabatannya, ketetapan sistem yang pernah ia berlakukan terhadap pedagang-pedagang asing (dalam hal ini Belanda) itu terpaksa menjadi longgar karena kekalahan yang dideritanya ketika mengadakan serangan ke Malaka pada tahun 1629 akibatnya ia menjalin hubungan dengan Belanda sebagai mitra kerja menghadapi Portugis di Malaka.

C. Masa Kemunduran

Setelah Sultan Iskandar Muda meninggal dunia pada tahun 1636 ia digantikan seorang menantunya, Sultan Iskandar Tsani yang memerintah selama kurang lebih 5 tahun yaitu sejak 1636-1641.

Sultan Aceh pengganti Sultan Iskandar Muda ini mempunyai sikap yang berbeda sama sekali dengan sultan sebelumnya dalam menanggapi kaum Kolonialis. Ia sangat lunak dan kompromistis, baik terhadap Belanda, Inggris ataupun Portugis. Ini berbeda dengan sikap Sultan Iskandar Muda yang begitu ketat terhadap orang asing.

Semenjak Aceh di bawah kekuasaan Sultan Iskandar Tsani, tanda-tanda kemunduran mulai tampak. Hal ini disebabkan oleh adanya campur tangan orang asing yang mendapat kesempatan dari sultan secara longgar.

Kemunduran Aceh ini semakin terasa setelah Sultan Iskandar Tsani wafat dan digantikan isterinya, Sultanah Tajul Alam Syafituddin Syah, yang memerintah pada tahun 1641-1675. Roda pemerintahan yang dulu begitu kokoh kini nampak ringkih dan goyah. Wilayah Aceh yang meliputi daerah-daerah tidak dapat lagi dikuasai oleh Sultanah sehingga nampak seolah-olah tidak ada lagi kekuatan untuk mempertahankannya. Banyak daerah bawahan yang melepaskan diri dari kekuasaan Aceh. Demikian halnya dalam masalah ekonomi yang kian terasa tidak stabil akibat ulah pedagang-pedagang asing yang kian terasa kuasanya dan sudah mulai menerapkan politik adu dombanya. Sementara situasi dalam negeri sudah nampak tidak sehat karena para kapitalis semakin meraja lela dalam penguasaan di bidang materi tanpa ambil peduli suasana perekonomian kerajaan yang sedang dilanda resesi berat.

Terpaksa Sultanah mengambil tindakan menjalin kerja sama dengan Belanda. Langkah ini dilakukan semata-mata untuk mempertahankan Aceh dari gilasan dan serbuan kaum Kolonialis sebagaimana yang terjadi di Malaka. Dasar niat untuk memonopoli sudah bersarang di hati Belanda

semenjak mereka menginjakkan kakinya di bumi Nusantara ini, maka sikap Sultanah tersebut dijadikan suatu momentum untuk lebih menancapkan cengkeraman kuku imperialismenya. hal ini terbukti dengan berbagai fasilitas dan kesempatan yang diberikan kepada mereka, maka akhirnya Belanda mendirikan kantor Dagang mereka di Padang dan Salida. Walaupun tindakan Belanda itu telah diperingatkan oleh Sultanah, namun rupanya mereka sudah tidak menghiraukan.

Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin Syah wafat tahun 1675 dan digantikan oleh sultan wanita Nurul Alam Nakiatuddin (tak jelas asal-usulnya) yang memerintah mulai tahun 1675-1678. Kehadirannya tak juga bisa mengentaskan kerajaan dari berbagai kemelut yang ada. Begitu pula ketika digantikan oleh puterinya Raja Sertia, Aceh tetap dirundung kemelut yang berkepanjangan. Baru setelah ulama-ulama dan tokoh masyarakat Aceh melancarkan perlawanan terhadap kompeni pada tahun 1873-1904, seperti Habib Abdurrahman, Teuku Umar dan isterinya, Cik Di Tiro, Panglima Polim dan lain-lain, Aceh naik lagi kharismanya.⁹

Ada dua faktor penting yang mengakibatkan kemunduran kerajaan Aceh Darussalam: masing-masing faktor intern dan faktor ekstern.

Faktor intern, yang pertama diakibatkan oleh lemahnya sultan-sultan pengganti Sultan Iskandar Muda dalam mengendalikan jalannya pemerintahan, yang menjadi sebab lepasnya daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh Aceh dan berusaha berdiri sendiri-sendiri sehingga lebih memudahkan pihak luar untuk memecah belah persatuan.

Kedua, banyaknya kaum kapitalis dalam negeri yang tidak peduli lagi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh kerajaan terutama di bidang ekonomi akibat dari sistem perekonomian yang diterapkan kaum kolonial. Kenyataan ini kemudian menyeret Aceh mengambil sikap kompromi dengan Kompeni.

Faktor ekstern, adanya campur tangan orang-orang Asing ; baik secara langsung atau tidak langsung. Kenyataan ini berawal dari kegagalan Aceh menyerang Portugis yang berkedudukan di Malaka pada masa akhir pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Sebagai akibatnya ia terpaksa memberi kelonggaran kepada Belanda untuk berdagang di wilayah Aceh karena telah membantunya dalam penyerangan Malaka. Campur tangan

⁹ Masalah perang Aceh, kesempatan ini penulis tidak sempat mengkajinya secara rinci mengingat masalah tersebut sangat kompleks dan memerlukan perhatian secara khusus.

ini berlanjut terus tanpa bisa ditolaknyia oleh pewaris-pewaris tahta berikutnya sampai pada akhirnya Aceh minta perlindungan kepada Kompeni.

D. Sistem Politiknyia

Berbicara mengenai sistem politik di kerajaan Aceh Darussalam bisa diklasifikasikan, paling tidak menjadi dua; periode sebelum Sultan Iskandar Muda (1514-1607) dan periode semenjak bertahtanya ke belakang.

Untuk periode awal, sebelum Iskandar Muda sistem perpolitikan Aceh Darussalam masih belum terorganisir secara baik dan rapih mengingat kondisinya baru saja terlepas dari pengaruh Pedie sehingga konsentrasi lebih tercurahkan untuk pembenahan militer dalam upaya mempertahankan keberadaannya dari berbagai kemungkinan bahaya yang datang dari dalam maupun dari luar (termasuk pengaruh Kolonialis). Disamping itu usaha ekspansi terus dilakukan untuk memperluas wilayah.

Berbeda halnya ketika Sultan Iskandar Muda menduduki tahta kesultanan Aceh, beliau disamping menjalankan ekspansi juga begitu antusias untuk menata rapih sistem politik, terutama yang berkaitan dengan konsolidasi atau pemantapan wilayah yang sudah dikuasainya. Langkah ini beliau tempuh mengingat betapa sistem pemerintahan yang mantap dan terkonsolidasi secara seksama akan menciptakan stabilitas yang sehat.

Ada dua sistem yang beliau tempuh dalam upaya stabilitas kesultanan Aceh pada saat itu: sistem politik internal (yang menyangkut kepentingan dalam negeri) dan sistem eksternal (yang berhubungan dengan negeri Asing).

Kaitannya dengan sistem politik internal, pada masanya telah tersusun struktur pemerintahan secara rapi yang secara koordinatif menghubungkan antara pusat dengan daerah-daerah. Wilayah inti kerajaan Aceh (Aceh Raya) terbagi atas wilayah sagi dan wilayah pusat kerajaan. Tiap sagi terbagi menjadi beberapa Mukim sagi XXV mukim (meliputi Aceh Barat), sagi XXII mukim (berada di bagian Tengah sebelah Selatan) dan sagi XXVI mukim (terletak di bagian Timur). Masing-masing sagi terbagi lagi menjadi wilayah yang lebih kecil setingkat distrik.¹⁰ Kemudian masing-masing distrik terbagi atas mukim-mukim (yang dikepalai oleh

¹⁰Kartodirdjo, *Sejarah Nasional*, IV., hal. 34.

seorang imam) sedang masing-masing mukim ini terbagi lagi menjadi *gamponn-gampong* (yang dikepalai oleh seorang Keuci).

Tiap-tiap sagi dikepalai oleh Panglima Sagi atau sering disebut dengan Hulubalang Besar yang bergelar Teuku sedang untuk masing-masing distrik dikepalai oleh Hulubalang (Uleebalang) yang bergelar Datuk. Para hulubalang, kecuali hulubalang Pusa, mempunyai kekuasaan yang otonom sifatnya; baik dalam mengatur tata pemerintahan wilayahnya sampai kepada pewarisan tahtanya. Sultan disini hanya berfungsi sebagai simbol pemersatu dari masing-masing sagi yang dikepalai langsung oleh para hulubalang.¹¹

Dalam menjalankan roda pemerintahan, sultan dibantu oleh seorang Mangkubumi yang membawahi empat mantri hari-hari (penasihat raja). Disamping itu raja juga dibantu oleh Syahbandaar untuk mengurus keuangan istana, Kepala Krueng (dibantu Dawang Krueng) untuk mengurus lalu lintas di muara sungai, Panglima Losot sebagai penarik cukai barang-barang eksport-import dan Krani sebagai sekretaris istana.

Jabatan-jabatan tinggi istana ini kemudian di abad ke-17 dan ke-18 lebih disempurnakan lagi, antara lain:

1. Hulubalang Rama Setia, sebagai Pengawal Pribadi Istana
2. Kerkum Katib al-Muluk, Sekretaris Istana
3. Raja Udah na Laila, sebagai Kepala bendaharawan istana dan perpajakan
4. Sri Maharaja Laila, sebagai Kepala Kepolisian; dan
5. Laksamana Panglima Paduka Sirana, sebagai Perwakapan.

Sistem pergantian raja di Aceh pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sistem di kerajaan-kerajaan lain. Hanya saja di Aceh sistemnya agak longgar, artinya tidak selalu terikat pada putra laki-laki saja tetapi wanita, kemenakan atau istri raja yang meninggal pun bisa.

Sedangkan sistem politik yang bersifat eksternal (yang berkenaan dengan orang-orang Asing), beliau mengambil jalan keras dan mengadakan pengetatan terhadap mereka. Sayangnya pewaris istana sesudah beliau tidak lagi menempuh jalan yang beliau terapkan, mereka cenderung lebih bersifat kompromistis mungkin langkah ini mereka tempuh karena terpaksa.

¹¹*Ibid.*, hal. 39.

E. Partusipasi dan Peranserta Ulama

Ulama, di kerajaan Aceh, mempunyai posisi yang sangat terhormat. Hal ini terjadi karena disamping kerajaan yang berpusat di Banda Aceh itu memakai Islam sebagai landasan geraknya, juga disebabkan adanya perhatian yang serius dari para raja yang berkuasa di Aceh dalam memandang betapa pentingnya ulama dan ilmu yang dimilikinya untuk mengendalikan (media kontrol) jalannya pemerintahan yang *Baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafur* serta mendapat ridla-Nya. Sesuai dengan Firman Allah :

atau hadits Nabi yang menyatakan bahwa terdapat dua golongan yang apabila keduanya baik maka menjadi baik pula manusia, akan tetapi apabila keduanya rusak maka rusaklah manusia, mereka itulah ulama dan umara' (pemerintah).

Suatu bukti bahwa kerajaan memberikan perhatian yang lebih terhadap keberadaan ulama, yaitu dengan ditempatkannya ulama pada posisi teras kerajaan; baik sebagai Mangkubumi atau pejabat lainnya. Mungkin masih segar dalam ingatan kita dari sederetan pahlawan-pahlawan Nasional yang berasal dari Propinsi Aceh, seperti Habib Abdurrahman, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Cut Mutia, Panglima Polim, Cik Di Tiro, mereka secara keseluruhan adalah pejabat-pejabat teras kerajaan, ada yang sebagai Mangkubumi seperti Habib Abdurrahman, sebagai Kepala sagi (Hulubalang Besar) seperti Teuku Umar dan sebagainya.

Disinyalir bahwa terdapat suatu wilayah di Aceh yang secara khusus diserahkan pengelolaan dan penguasaannya kepada ulama, yaitu Masjid Raya dan sekitarnya. Di sana Sultan tidak memerintah langsung tetapi dilimpahkan kepada Hakim tertinggi kerajaan Teuku Kadli Malikul Adil dan Panglima Masjid Raja.¹² Ini menunjukkan betapa besar perhatian kerajaan terhadap keberadaan ulama.

Indikasi lain yang bisa kita jadikan titik pandang untuk melihat peran ulama di Aceh Darussalam, ialah adanya lembaga-lembaga yang sengaja diberi restu oleh sultan untuk menghimpun para ulama dalam mendis-

¹²*Ibid.*, hal. 36.

kusikan berbagai masalah keagamaan, seperti Balai Jama'ah Himpunan Ulama dan Balai Setia Hukama'.

Dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa peranan dan partisipasi ulama sangat intensif sehingga wajar apabila di Aceh, kota Serambi Mekkah, ini muncul ulama-ulama besar dengan berbagai karya ilmiahnya yang berbobot, seperti : Hamzah Fansuri, Nuruddin ar-Raniri, Syamsuddin as-Sumantrani dan Abdur Rauf as-Singkeli.

F. Hasil Karya Ilmiah

Terdapat beberapa karya ilmiah yang telah diciptakan oleh para ulama di Aceh Darussalam, antara lain :

1. Karya Hamzah Fansuri :
 - a. Syarah al-Asiqin
 - b. Asrar al-arifien fi bayani 'ilmi al-suluk wa at-tauhid.
 - c. Ruba'i al-muhaqqiqin
 - d. Kasyf as-sirri at-tajalli as-subhani
 - e. Muntahi
 - f. Miftahu al-asrar dan
 - g. Sya'ir - sya'irnya : Sya'ir burung pinggai, sya'ir Perahu, sya'ir Sidang Fakir dan sya'ir Dagang.
2. Karya-karya Syamsuddin as-Sumantrani :
 - a. Mir'atu al-mukminin
 - b. Mir'atu al-muhaqqiqin
 - c. Syarah Ruba'i Hamzah Fansuri
 - d. Jauhar al-haqa'iq
 - e. Mir'atu al-imah dan
 - f. Tanbihu at-tullab fi ma'rifati al-malik al-wahhab
3. Karya-karya Nuruddin ar-Raniri :
 - a. Asrar al-insan fi ma'rifati ar-ruh wa ar-Rahman
 - b. Sirat al-Mustaqim
 - c. Durratu al-Fara'id wa Syarh al-aqa'id
 - d. Hidayatu al-habib fi at-Targhib wa at-Tartib
 - e. Bustanu as-Salatin fi Dzikri al-awwalin wa al-Akhirin
 - f. Nubda'u fi Da'wail-Ziil
 - g. Ma'a Sahabihi
 - h. Lata'ifu al-Asrar

- i. Akhbaru al-Akhirat fi Ahwali al-Qiyamah
- j. Hillu az-zilli
- k. Ma al-Hayat li Ahli al-Mamat
- l. Jawahiru al-Ulumi fi Kkasyfi al-Ma'lum
- m. Umdat al-I'tiqad
- n. Syifa'u al-Qulub
- o. Hujjatu as-Siddiq li Daf'i az-Zindiq
- p. Fathu al-Mubin ala al-Mulhidin
- q. Kifayatu as-Salah dan
- r. Muhimmadatu al-I'tiqadi
4. Karya-karya Abdur-Rauf as-Singkeli :
 - a. Mir'atu at-Tullab fi Tasyri al-Ma'rifata al-Ahkami as-Syari'ati li Malik al-Wahhab
 - b. Kifayatu al-Muhtajin
 - c. Daqiqu al-Huruf
 - d. Bayanu Tajalli
 - e. Umdat al-Muhtadiin
 - f. Mawaiz al-Badi'i (terjemahan)
 - g. Sya'ir Ma'rifat dan
 - h. Tafsir al-Qur'an dalam bahasa Melayu (jawi)

Wilayah ini di akhir abad ke-16 (pada masa pemerintahan Sultan Pajang - Jaka Tingkir) telah dibatal kembali oleh seorang Panglima Pajang "Ki Gede Ngerns" yang kemudian populer dengan Ki Panembahan dengan suatu misi untuk memisahkan wilayah tersebut ke dalam pengaruh Islam dibawah panti kerajaan Pajang. Wilayah Mataram diserahkan Sultan Pajang kepada Ki Gede Ngerns beserta putranya, yang kelak menjadi Panembahan Senopati, atas jasa mereka dalam membantu menipuhkan Aria Perangsang di Jepang Pandan.¹

Ki Panembahan, ditunjuk sebagai penguasa Mataram yang patuh dan taat kepada Sultan Pajang. Ia mulai naik tahta di istananya yang baru di Kotagede pada tahun 1577 M sampai tutup usianya di tahun 1594.²

¹ H.T. De Graaf dan T.H. G. T.H. Pigeaud, *Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, Bali, Celebes dan Kalimantan*, PT Grafindo pers. Jakarta, 1965, hal. 277-281.

² Ibid. hal. 282

II

KERAJAAN MATARAM

A. Latar Belakang Berdirinya

Mataram pada mulanya hanyalah merupakan hutan yang penuh tumbuhan tropis di atas puing-puing istana tua Mataram Hindu, lima abad sebelum berdirinya kerajaan Mataram (Islam) yang kita bicarakan sekarang ini.

Wilayah ini di akhir abad ke-16 (pada masa pemerintahan Sultan Pajang - Jaka Tingkir) telah dibedah kembali oleh seorang Panglima Pajang "Ki Gede Ngenis" yang kemudian populer dengan Ki Pemanahan dengan suatu misinya untuk memasukkan wilayah tersebut ke dalam pengaruh Islam dibawah panji kerajaan Pajang. Wilayah Mataram dianugerahkan Sultan Pajang kepada Ki Gede Ngenis beserta puteranya, yang kelak menjadi Panembahan Senopati, atas jasa mereka dalam ikut serta melumpuhkan Aria Penangsang di Jipang Panolan.¹

Ki Pamenahan, disinyalir seagai penguasa Mataram yang patuh dan taat kepada Sultan Pajang. Ia mulai naik tahta di istananya yang baru di Kotagede pada tahun 1577 M sampai tutup usianya di tahun 1584.²

¹H.J. De Graaf dan T.H. G. T.H. Pigeaud, *Kerajaan-kerajaan Isla di Jawa*, terj. Grafiti press dan KITLV, PT Grafiti pers, Jakarta, 1985, hal. 277-281.

²*Ibid.*, hal. 282.

Setelah wafat ia diganti putranya, ngabehi Loring Pasar, yang kemudian diberi gelar oleh Sultan Pajang sebagai Senopati Ing Alaga Sayidin Panatagama atau mashur dengan Panembahan Senopati.³

Berbeda dengan ayahnya, yang menempuh jalan patuh sebagai kerajaan bawahan Pajang, ia dengan sengaja mengabaikan kewajibannya sebagai raja bawahan dengan tidak *seba* atau *sowan* tahunan terhadap raja Pajang.⁴ Konsekuensinya akhirnya raja Pajang memutuskan untuk menyelesaikan pembangkangan Mataram dengan jalan kekerasan dan kekuatan senjata. Ekspedisi penyerbuan dibawah komando Sultan Pajang sendiri itu mengalami kegagalan karena bersamaan dengan meletusnya Gunung Merapi yang mengakibatkan bercerai berainya prajurit Pajang. Beberapa saat kemudian, sekembalinya dari ekspedisi yang gagal itu, Sultan Pajang meninggal dunia. momentum ini dimanfaatkan oleh Panembahan Senopati untuk memproklamasikan dirinya sebagai penguasa di seluruh Jawa.⁵

Senopati Mataram merupakan figur penguasa yang agresif. Semenjak ia menobatkan dirinya menjadi penguasa banyak sekali kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan sebagian di Jawa Timur menjadi ajang taklukannya. Tercatat pada masa berkuasanya (1584-1601 M), Pajang dan Demak dapat ditaklukan pada tahun 1588 (konon semenjak peristiwa ini ia mendapat gelar Panembahan) menyusul kemudian Madiun pada tahun 1590 dan Jepara (Kalinyamat) pada tahun 1599. Pada tahun yang bersamaan Tuban juga diserang yaitu tahun 1598 dan 1599 tetapi masih dapat bertahan hingga diduduki pada tahun 1619 oleh Sultan Agung.⁶

Panembahan Senopati mangkat pada tahun 1601 digantikan putranya yang bernama Mas Jolang atau Ki Gede Mataram yang kemudian masyhur dengan julukan Panembahan Sede Ing Krapyak,⁷ yang memerintah tahun 1601 sampai 1613.

Dalam menjalankan roda pemerintahan Sultan yang baru naik tahta ini tidak memiliki watak agresif sebagaimana bapaknya, ia lebih cenderung

³Kartodirdjo, *Sejarah Nasional*, III., hal. 286.

⁴Seba atau sowan adalah sidang raja-raja yang diselenggarakan oleh raja yang paling besar pengaruhnya.

⁵De Graaf, *Kerajaan-kerajaan*, hal. 285.

⁶Kartodirdjo, *Sejarah Nasional*, hal. 295.

⁷Julukan ini diberikan karena ia meninggal di Krapyak (tempat perburuan) ketika ia sedang berburu.

mengadakan pembangunan dibanding ekspansi. Banyak sekali dijumpai bangunan-bangunan yang sebelumnya tidak ada, seperti : Prabayeksa (tempat kediaman raja) dibangun pada tahun 1603, Taman Danalaya pada tahun 1605, membuat lumbung di Gading tahun 1610 dan lain-lain. Maka ia terkenal sebagai raja yang ahli membangun. Kecenderungan yang ia sukai ialah berburu, dalam hal ini ia mempunyai daerah khusus untuk perburuan yang dinamakan dengan krapyak.⁸

Sikapnya itu ternyata kurang disukai oleh sebagian rakyat, terbukti pada masanya telah terjadi pemberontakan-pemberontakan; Pangeran Puger di Demak pada tahun 1602-1605 dan Pangeran Jayaraga di Ponorogo pada tahun 1608. Motif pemberontakan yang dilancarkan kedua kakaknya memiliki kemiripan, yakni rasa tidak puas atas diangkatnya Mas Jolang berikut kebijaksanaan-kebijaksanaannya. Kedua pemberontakan tersebut akhirnya bisa dipadamkan.

Di sisi lain, Surabaya, yang belum sempat ditaklukkan oleh Panembahan Senopati, sedang menyusun kekuatan dan menguasai sebagian kerajaan di wilayah Jawa Timur sehingga ia merupakan rival bagi kerajaan Mataram dalam upaya mempersatukan seluruh Jawa di bawah imperiumnya. Sementara Mataram sibuk menghadapi konflik dalam negeri dan tidak sempat menganeksasi daerah-daerah sekitar sebagaimana yang dilakukan orang tuanya.

Peristiwa yang sebelumnya tidak pernah terjadi yaitu ia telah menjalin kerja sama dengan kompeni Belanda di akhir masa berkuasanya pada tahun 1613. Setahun kemudian, tepatnya tanggal 1 Oktober 1613, Sultan yang gemar berburu itu meninggal dunia ketika berburu di Krapyak.

B. Masa Kejayaannya

Pewaris tahta Mataram ketiga ialah Sultan Agung. Beliau yang memiliki nama kecil Den Mas Rangsang naik tahta pada tahun 1613 hingga wafatnya tahun 1646.

Berbeda sekali dengan ayahnya, ia termasuk figur pemimpin yang keras dan tegas tetapi bijaksanan. Nampaknya karakter itu ia warisi dari almarhum kakeknya. Ia juga yang telah meneruskan ekspansi-ekspansi keberbagai wilayah yang pada masa Panembahan Senopati masih belum tuntas.

⁸H.J. De Graff, *Puncak Kekuasaan Mataram (Politik ekspansi Sultan Agung)*, terj. Grafiti pers dan KITLV, Jakarta, 1986, hal. 22-23.

Beberapa lama setelah naik tahta, ia segera mengirimkan ekspedisi penaklukan ke kerajaan di wilayah Jawa Timur. Usaha itu selalu berhasil, dengan tanpa mengalami kesulitan maka pada tahun 1615 Wirasaha dapat dikuasai menyusul kemudian Lasem (1616), Pasuruhan (1617), Tuban (1619) dan Madura pada tahun 1624. Surabaya, yang merupakan saingan berat Mataram, setelah diserbu beberapa kali akhirnya takluk (1625) berikut Giri (1636) dan Blambangan di tahun 1639.⁹

Dengan dikuasainya kerajaan-kerajaan di wilayah Jawa Timur ini maka hampir sempurna kedudukan Mataram sebagai penguasa Jawa, sebagaimana yang dicita-citakan perintisnya, Panembahan Senopati, tinggal wilayah Barat saja yang belum mampu dikuasai.

Usaha ekspansi ke wilayah Barat (Jakarta - yang saat itu dikuasai oleh Kompeni), sebenarnya sudah pernah dilakukan Sultan Agung pada tahun 1628 dan 1629, akan tetapi belum memperoleh hasil yang menggembirakan bahkan banyak menelan korban di pihak Mataram. Hal ini disebabkan disamping sistem persenjataan yang kalah canggih juga karena adanya seorang prajurit Mataram yang membelot dan memihak kepada Belanda serta menunjukkan gudang perbekalan Mataram yang berada di Tegal - akhirnya logistik itu pun dibakar oleh Kompeni dan banyak prajurit Mataram yang mati kelaparan. Disinyalir pula bahwa pada saat serangan itu terjadi prajurit Mataram sedang dilanda wabah malaria.

Walaupun usaha untuk membendung pengaruh VOC itu belum memperoleh sukses sebagaimana yang diharapkan tetapi telah menimbulkan rasa hormat para penguasa pribumi luar Jawa.

Suatu hal yang menarik untuk diperhatikan ialah kenapa dalam upaya perluasan wilayah ke Barat Sultan tidak mengadakan serangan terhadap Cirebon padahal ia telah mengirimkan ekspedisinya dua kali ke Batavia untuk menyerbu VOC, rencananya jika usaha tersebut berhasil akan dilanjutkan menganeksasi Banten ? bahkan rencana untuk menyerang pun tidak pernah terlintas.

Beberapa alasan bisa dikemukakan di sini. Pertama, karena Cirebon diperintah oleh raja-raja keturunan Sunan Gunung Jati dan sekaligus sebagai penerima Islam lebih dulu dibanding Mataram sehingga Mataram memandangnya sebagai kerajaan yang lebih tua dan rajanya dianggap

⁹Kartodirdjo, *Sejarah Nasional*, III, hal. 295.

sebagai orang-orang suci. Di saat Sultan Agung berkuasa, Cirebon diperintah oleh Panembahan Ratu yang usianya lebih tua dibanding Sultan Agung dan ia dianggap sebagai guru.

Kedua, antara Mataram dengan Cirebon telah terjalin hubungan persahabatan bahkan kekeluargaan yang intim sehingga sangat disayangkan jika persahabatan tersebut harus lenyap hanya karena ambisi pribadi. Disinyalir bahwa sebelum Panembahan Senopati wafat ia telah mewasiatkan kepada putranya agar tetap melestarikan hubungan baiknya dengan Cirebon.

Ketiga, bisa jadi Cirebon sengaja tidak diserang dengan suatu pamrih agar usahanya untuk menaklukkan Banten seusai menyerang Batavia tidak mendapat kesulitan. Jadi Cirebon di sini dijadikan perantara yang menghubungkan Mataram dengan Banten.¹⁰

C. Masa Kemundurannya

Kharisma Mataram menjadi turun semenjak mangkatnya Sultan Agung di bulan Februari 1646 dan diganti putranya "Susuhunan Amangkurat I".

Raja baru Mataram yang menggunakan gelar Susuhunan (artinya yang disembah atau dipuji - bisa juga berarti Kaisar) ini disamping memerintah secara otoriter, kejam juga termasuk raja yang antipati terhadap ulama. Tercatat selama ia berkuasa telah membantai dua ribu ulama termasuk mertuanya, Sunan Giri.¹¹

Bersekongkol dengan Kompeni, berpola hidup ala Barat, dansa, minum minuman keras dan lain sebagainya merupakan kebijaksanaan yang ditempuh. Ini berbeda dengan para pendahulunya yang menghormati ulama dan antipati terhadap kompeni adapun Sultan Agung menjalin kerja sama dengan Portugis itu sebatas demi kepentingan kerajaan atau dengan kata lain untuk membendung usaha penetrasi yang dijalankan oleh kompeni yang bermarkas di Batavia.

Sebagai akibatnya maka banyak daerah yang di masa Sultan Agung menjadi bawahan Mataram, melepaskan diri. Pemberontakan-pemberontakan pun tak bisa dihindarkan lagi, seperti : Trunojoyo (Madura), K. Kajoran (tokoh agama) dan anaknya sendiri Adipati Anom.

¹⁰*Ibid.*, hal. 296.

¹¹M. Yahya, *Sejarah Masuknya*, hal. 25.

Masa kelayakan terus menyelubungi bumi bedahan Ki Pemanahan beserta putranya Panembahan Senopati dan mencapai kegemilangan pada masa Sultan Agung Hatta akhirnya di tahun 1755 M, Mataram terbagi menjadi dua bahagian : Yogyakarta yang dipimpin Hamengkubuwono dan Surakarta dibawah kekuasaan Pakubuwono.¹²

D. Sistem Politiknya

Sistem politik di kerajaan Mataram, kalau dibicarakan secara detail, sangat luas serta menyita waktu yang tidak sedikit. Kesempatan ini disinggung selang pandang itupun hanya terbatas pada masa Panembahan Senopati hingga Susuhunan Amangkurat I. Hal ini sangat menarik mengingat suhu politik di periode-periode tersebut mengalami turun naik secara drastis; Periode Panembahan Sedo Ing Krapyak kemudian Sultan Agung lain dengan ayahnya dan Susuhunan Amangkurat I bertolak belakang dengan apa yang telah ditempuh pendahulunya.

Untuk sistem politik yang intern sifatnya, terutama yang menyangkut konsolidasi tata pemerintahan dalam negeri, seperti sistem birokrasi, sistem penggantian raja dan lain-lain masing-masing mereka hampir tak ada perbedaan andaikata ada itu hanya menyempurnakan apa yang telah berlaku.

Akan tetapi dalam hal penguasaan wilayah dan upaya ekspansi, kadang-kadang mengalami kenaikan (banyak daerah yang dapat dikuasai) kadang-kadang menurun (banyak yang melepaskan diri dari pengaruh Mataram), seperti pada masa pemerintahan Panembahan Senopati di sini dengan kharismanya yang tinggi ia telah mampu mengangkat martabat Mataram ke strata yang lebih bergengsi (yakni daerah bawahan Pajang menjadi daerah yang berdiri sendiri). Akan tetapi ketika putranya berkuasa usaha ekspansi terhenti dan banyak daerah yang memberontak untuk melepaskan diri.

Degradasi politik Mataram segera bisa diatasi saat putranya, Sultan Agung, tampil sebagai pemegang tampuk pemerintahan bahkan pada masanya gengsi Mataram berada dalam posisi puncak. Daerah-daerah di seluruh Jawa, kecuali wilayah Barat semuanya berada dalam imperium Mataram. Ketika kendali pimpinan beralih ke tangan Susuhunan

¹²*Ibid.*, hal. 30.

Amangkurat I martabat Mataram menjadi merosot kembali, wilayah kekuasaannya pun semakin menciut.

Dari keterangan di atas dapat diambil pengertian bahwa karisma rajalah yang memegang kunci penting sukses tidaknya, terangkat atau merosotnya martabat kerajaan. Karena raja memiliki kekuasaan sentral yang syah atas wilayah kekuasaannya, maka ia dipandang sebagai pusat kosmos dan dari pribadinya terpancar kekuatan yang berpengaruh pada alam dan masyarakat sekitarnya.

Keabsahan (legitimitas) kedudukan dan kekuasaan raja Mataram, kecuali Panembahan Senopati, diperoleh karena warisan. Secara tradisional pengganti raja-raja ditetapkan putera laki-laki tertua dari permaisuri raja (garwa padmi), bila tidak ada maka putra laki-laki dari isteri selir (garwa ampeyan) pun bisa dinobatkan sebagai pengganti raja. Apabila terpaksa dari keduanya tidak didapatkan masa saudara laki-laki, paman atau saudara laki-laki tua dari ayahnya bisa menjadi pengganti.¹³

Sistem penggantian raja di Mataram ini lebih terikat dibandingkan Aceh Darussalam yang longgar, di sini yang berhak mewarisi tahta hanya mereka yang dari jalur laki-laki dan kenyataannya hingga kini tak seorangpun penguasa Mataram, baik yang ada di Yogyakarta maupun di Surakarta (Solo) terdiri dari wanita.

Mengenai sistem politik eksternalnya, di antara penguasa Mataram bisa ditemui perbedaan-perbedaan yang menyolok dalam menerapkan sistem untuk menghadapi penetrasi Barat; ada yang menempuh sikap kompromistis dan ada pula yang anti pati sama sekali.

Pada masa Panembahan Senopati, usaha tersebut memang belum ditemui. Hal ini disebabkan walaupun saat itu orang-orang Eropa sudah nongol di Nusantara, konsentrasi politik sedang dicurahkan untuk konsolidasi dan penguasaan kerajaan-kerajaan sekitarnya. Sedangkan pada masa Panembahan Sedo, Krpyak kehadiran Belanda diterima dengan baik di akhir kekuasaannya.

Beda halnya dengan penguasa Mataram berikutnya, Sultan Agung, beliau termasuk penguasa yang antipati pada Kompeni. Berbagai usaha telah diupayakan untuk mengusik keberadaan dan membendung penetrasinya yang kian kuat di bumi Nusantara. Dua kali sudah ekspedisi

¹³Kartodirdjo, *Sejarah Nasional*, IV, hal. 15.

militer ia kirimkan ke Batavia untuk memukul mundur VOC; masing-masing pada tahun 1628 dan 1629 walaupun pada akhirnya memperoleh kegagalan.

Setelah tokoh penentang keras kompeni itu wafat, Mataram kemudian diperintah raja yang pro dengan kompeni, Susuhunan Amangkurat I. Walaupun kebijaksanaan dan langkahnya mendapat tantangan dari kebanyakan rakyat tetapi ia tetap bersikeras melaksanakannya. Akhirnya meletuslah berbagai pemberontakan. Pada masanya wilayah Mataram, yang dulunya sangat luas pengaruhnya, sedikit demi sedikit berkurang. Sementara kekuasaan kompeni semakin luas, pengaruhnya terhadap sistem intern kerajaan semakin besar, sistem penggantian tahta, pengangkatan pejabat-pejabat tinggi kerajaan, pelaksanaan birokrasi dan lain-lain tak lepas dari pengawasan Belanda.

E. Peranan Ulama dan Partisipasinya

Sebagaimana di kerajaan-kerajaan Islam lainnya, ulama di kerajaan yang dibangun di atas puing-puing peradaban Hindu ini juga memperoleh posisi terhormat. Partisipasinya dalam mewujudkan stabilitas kerajaan tidaklah sedikit, terutama di bidang kerohanian dan mental spiritual.

Kaitannya dengan permasalahan ini, De Graaf dalam bukunya "Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa" mensinyalir bahwa raja-raja Mataram memandang atau mengangkat wali-wali Kadilangu (dekat Demak) sebagai penasihat dan pembimbingnya. Sering tokoh bernama Sunan Kalijaga dimunculkan dalam berbagai berita, ia juga dianggap sebagai orang yang berinisiatif membangun tembok keliling kerajaan berasama dengan Senopati Kediri.¹⁴

Apabila dicermati, gerak ulama di kerajaan Mataram lebih sempit lingkupnya dibanding dengan Aceh. Kalau di Aceh ulama itu bisa berperan di berbagai aspek kehidupan termasuk juga duduk sebagai aparat pemerintah atau memimpin pertempuran melawan penetrasi Barat, maka di Mataram bisa ditemukan peran ulama tidak lebih hanya sebagai kaum rohaniawan atau penasihat istana di bidang mental spiritual. Kenyataan ini bisa difahami karena keberadaan Mataram itu sendiri terletak di atas puing-puing budaya Hindu yang sudah mendarah daging maka otomatis

¹⁴De Graaf, *Kerajaan-kerajaan*, hal. 295.

benturan budaya terjadi di sana, termasuk dalam menentukan klasifikasi sistem sosial. Posisi ulama (agamawan) kalau dalam ajaran agama Hindu menduduki strata sosial (kasta Brahmana) barangkali kedudukan ulama di sini disejajarkan dengan tingkatan kaum elite kerajaan yang tidak banyak perlu bekiprah dalam persoalan-persoalan yang tidak ada hubungannya dengan bimbingan massa terutama soal keagamaan. Adapun tugas lainnya itu diserahkan sepenuhnya kepada kaum bangsawan atau ksatria.

Atau mungkin juga karena ulama pada saat itu sedang konsentrasi menggarap soal Islamisasi terhadap budaya-budaya yang masih lekat di hati masyarakat Mataram, Sunan Kalijaga, misalnya beliau yang dianggap sebagai ulama beken Istana selalu berusaha keras agar ajaran Islam mudah diterima masyarakat yang sudah kuat nilai kepercayaan terhadap ajaran dan doktrin budaya sebelum Islam. Berbagai cara telah beliau tempuh termasuk melalui karya seni yang telah mentradisi di masyarakat.

Memang disadari pindahnya pusat pemerintahan dari pesisir utara Jawa (arus Islamisasi utama) ke daerah pedalaman yang agraris serta telah dipengaruhi budaya pra Islam, menimbulkan warna baru bagi Islam yang kemudian disebut dengan Islam sinkritisme (percampuran ajaran Islam dengan budaya-budaya pra-Islam), seperti : kepercayaan Grebeg Sekaten, labuhan di segara kidul pada bulan Suro, penggelaran benda-benda keramat dan lain-lain.

Berkenaan dengan sinkritisme ini, Sartono dalam bukunya “Sejarah Nasional” telah mensinyalir bahwa Babad Tanah Jawi menceritakan tentang para wali yang berdzikir di Masjid Demak tiba-tiba jatuh di hadapan mereka sebuah bungkusan berisi sajadah dan selendang Rasulullah s.a.w. Kedua benda itu kemudian oleh Sunan Kalijaga dinamakan Antakusuma atau Ki Gundil. Baju inilah yang menjadi perlambang pakaian resmi raja-raja Jawa semenjak Panembahan Senopati Mataram.¹⁵

Demikianlah keadaan Islam semenjak berpusat di Mataram, campur tangan budaya setempat yang kemudian terkenal dengan Islam Kejawen.

Peranan ulama menjadi tergeser semenjak Mataram dikuasai oleh Amangkurat I. Pada saat itu terjadi de-Islamisasi. Banyak ulama yang dibunuh serta kehidupan keagamaan merosot, sementara dekandensi moral menghiasi keruntuhan pamor Mataram akibat dari campur tangan budaya asing yang kian mencoreng dan makin hari makin kuat.

¹⁵Kartodirdjo, *Sejarah Nasional*, III, hal. 265.

III

KERAJAAN BANTEN

A. Berdiri dan Perkembangannya

Peletak dasar nilai keislaman di kawasan Sunda ialah Nurullah dari Samudera Pasai. Beliau datang ke sana pada tahun 1525 atau 1526 atas perintah Sultan Demak (Trenggono). Kedatangan Nurullah atau Syarif Hidayatullah atau Fatahilah yang kemudian menjadi Sunan Gunung Jati di Jawa bagian barat itu dengan misi pertama penyebaran Islam (misi agama) dan kedua memperluas wilayah kekuasaan Demak (misi politik).

Sesampainya di kota pelabuhan Banten ia segera menyingkirkan Bupati setempat baru kemudian pada tahun 1527 Sunda Kelapa (pelabuhan tua) dapat direbutnya. Runtuhnya pelabuhan Sunda Kelapa yang amat berharga bagi kerajaan Pajajaran Hindu itu kemudian sebagai peringatan atas peristiwa bersejarah ini maka kota tersebut diberi nama Jayakarta yang di abad ke-20 nanti terkenal dengan Jakarta.

Sebagai penguasa Islam baru di Banten ia bersikap sebagai bawahan Demak. Wilayah kekuasaannya meliputi Banten, Jakarta dan Cirebon. Pada masanya usaha untuk menjarah Pakuan Pajajaran masih belum terencana hal ini karena disamping jangkauannya agak jauh dari pantai juga disibukkan oleh usaha pembenahan kekuasaan barunya terutama dalam mengantisipasi masa transisi budaya dari Hindu ke Islam bahkan

untuk kepentingan ini ia harus berpindah-pindah tempat, kadang-kadang di Banten kadang di Cirebon.

Baru setelah Pangeran Pasareyan dijadikan wakilnya di Cirebon tugasnya sedikit berkurang. Pangeran Pasareyan hanya sebentar berkuasa, ia meninggal dalam usia yang relatif muda pada tahun 1552. Kematiannya memaksa Sunan Gunung Jati pindah ke Cirebon untuk selama-lamanya. Adapun Banten dan Jayakarta penguasaannya diserahkan kepada putranya Hasanudin.

Ada satu persoalan yang patut dipaparkan di sini ialah setelah pelabuhan Sunda Kelapa direbut Sunan Gunung Jati pada tahun 1527, orang Portugis yang telah mengadakan perjanjian dengan Sang Hyang dari Pajajaran tahun 1522 datang ke Sunda Kelapa untuk mendirikan perkantoran dagang mereka tidak mengerti kalau daerah tersebut telah dikuasai oleh Islam. Terang saja kehadiran mereka disambut dengan kekerasan senjata.¹

Hasanudin, penguasa kedua Banten, melanjutkan cita-cita ayahnya untuk meluaskan pengaruh Islam. Banyak tindakan progresif yang ia lakukan dalam rangka memberikan arah terhadap kesultanan yang baru muncul tersebut. Membangun tempat tempat ibadah (masjid agung Banten dan Pacinan) dan sarana pendidikan berupa pesantren di Sasunyan (pengembangannya terjadi pada masa pemerintahan Maulana Yusuf) adalah karya nyata Maulana Hasanudin yang monumental terhadap generasi penerusnya.

Tercatat kekuasaan Banten saat itu meliputi seluruh Banten, Jayakarta, Krawang, Lampung dan Bengkulu. Banten yang dulunya hanya merupakan Kadipaten, pada tahun 1552 berubah menjadi negara bagian Demak dan Pangeran Hasanudin ditunjuk sebagai Sultannya bahkan tatkala kesultanan Demak runtuh dan di ganti Pajang pada tahun 1568 Maulana Hasanuddin memproklamasikan Banten sebagai kesultanan yang merdeka dan independen tanpa terkait dengan penguasa Pajang.

Pusat pemerintahan yang semula berada di Banten Girang dipindahkan ke Banten Lor (Surosowan). Inisiatif Syarif Hidayatullah ini dimaksudkan agar secara politis dan ekonomis memudahkan hubungan antara pesisir utara Jawa dengan pesisir Sumatra Barat, Selat Sunda dan Malaka.²

¹De Graaf, *Kerajaan-kerajaan*, hal. 148.

²Hassan Muarif Ambary, dkk., *Sejarah Banten Dari Masa ke Masa*, tp., Serang, 1988, hal. 14-19.

Pada sekitar tahun 1570 M Sultan pertama Banten wafat dan digantikan putra sulungnya, Pangeran Yusuf. Setelah meninggal Maulana Hasanuddin terkenal dengan nama anumertanya “Pangeran Saba Kingking”.³

Dibawah kuasa Pangeran Yusuf, kharisma Banten naik selangkah lebih tinggi. Proses Islamisasi pun nampak tambah sempurna. Seluruh wilayah Banten, baik di pusat kota Banten Girang, Banten Surowowan maupun daerah selatan telah mengikuti agama Islam, hal ini disebabkan karena Adipati Pucuk Umum (penguasa tertinggi Banten Hindu) telah menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa Islam.

Pesantren Kasunyatan yang telah dirintis oleh Sultan Hasanuddin dikembangkan secara intensif sehingga mampu mengorbitkan kader-kader agama yang handal dan bertanggungjawab. Salah satu karya nyata dari kegiatan ilmiah di pesantren Kasunyatan ialah sebuah Al-Qur'an dengan tulisan tangan yang kini tersimpan di cungkup makam Maulana Yusuf. Masjid Agung Banten bukan saja sebagai sarana ibadah mahdah tetapi sifungsikan sebagai tempat dakwan dan *bahsul masa'il ad-dien* (diskusi problematika agama) bagi ulama-ulama saat itu.⁴

Dalam upaya perluasan wilayah Islam Maulana Yusuf, yang dicatat Babad Banten sebagai penguasa yang gagah perkasa dan memiliki ketrampilan istimewa dalam berperang, dengan dibantu prajurit dan tokoh agama telah mampu meruntuhkan secara pasti kerajaan 'kafir' tua Pajajaran dan merebut Pakuan (Ibukota Kerajaan).⁵

Sukses besar lainnya yang dicapai selama ia berkuasa ialah perhatiannya terhadap pertanian, langkah ini ternyata membuat kehidupan rakyat Banten menjadi lebih makmur. Waduk atau danau buatan yang disebut “Tasikardi” merupakan inisiatifnya untuk mengairi persawahan-persawahan sekaligus dimanfaatkan untuk kebutuhan istana dan kota sekitarnya.⁶

Maulana Yusuf wafat tahun 1580 dimakamkan di Pekalongan Gede dekat Kasunyatan maka ia terkenal dengan nama anumertanya “Pangeran Panembahan Pekalongan Gede” atau “Pangeran Pasareyan”.

³De Graaf, *Kerajaan-kerajaan*, hal. 152.

⁴Ambary, *Sejarah Banten*, hal. 21.

⁵De Graaf, *Kerajaan-kerajaan*, hal. 152.

⁶Di tengah-tengah danau buatan tersebut terdapat pulau kecil tempat rekreasi atau dharma wisata.

Meninggalnya Maulana Yusuf menimbulkan intrik politik di istana Banten yang baru merambah kejengang suksesinya. Pangeran Arya Jepara (adik Maulana Yusuf yang dididik di Jepara oleh Ratu Kalinyatat) datang ke Banten untuk meminta supaya dirinya diangkat sebagai pengganti saudaranya sementara menunggu sampai pangeran pewaris tahta menjadi dewasa. Saat itu usia Pangeran Muhammad (putra mahkota) baru 9 tahun.

Akan tetapi Kadli dan pejabat besar istana lainnya memutuskan untuk tetap menobatkan Pangeran yang masih belum dewasa itu sebagai Sultan Banten untuk mengganti ayahnya. Adapun masalah jalannya pemerintahan sepenuhnya diperwalikan kepada Mangkubumi sampai sang Pangeran dewasa.

Merasa kehendaknya tidak terkabul, maka tersinggunglah Pangeran Arya Jepara dan terjadilah bentrokan senjata antara kedua belah pihak. Dalam pertempuran itu Pangeran Jepara kalah dan akhirnya ia kembali ke Jepara dengan tangan hampa.⁷

Setelah dewasa Maulana Muhammad terkenal sebagai seorang yang shalih dan memiliki ghirah yang kuat untuk menyebarluaskan Islam, ia banyak mengarang kitab serta membangun sarana-sarana ibadah sampai ke pelosok desa. Menjadi imam dan Khatib adalah kebiasaannya.

Walaupun kemajuan yang diperoleh Maulana Muhammad tidak setinggi ayahnya namun ada suatu peristiwa menonjol yang terjadi pada masa kekuasaannya, yaitu penyerbuan atas Palembang. Ekspedisi penyerangan ini bermula dari bujukan Pangeran Mas (putra Aria Tangiri) yang berambisi menjadi raja di Palembang untuk menganeksasi daerah tersebut sebagai upaya perluasan daerah Islam. Sayang dalam pada itu Sultan Banten yang relatif masih muda itu gugur di medan tempur pada tahun 1596 dengan meninggalkan seorang pewaris tahta yang baru berusia 5 bulan.⁸

Pengganti Maulana Muhammad putranya Sultan Abdul Mufakhir Mahmud Abdul Kadir (1596-1651). Karena saat penobatannya sebagai Sultan Banten keempat ia masih balita, maka untuk yang kedua kalinya kesultanan Banten diserahkan kuasanya (sebagai wali) kepada Mangkubumi Jayanegara, ia termasuk abdi yang memiliki loyalitas tinggi sehingga ketika Banten berada dalam kuasanya, baik periode Maulana

⁷De Graaf, *Op. cit.*, hal. 153-154.

⁸Ambary, *Sejarah Banten*, hal. 31-32.

Muhammad maupun periode Abdul Mufakhir tetap dalam kondisi stabil dan tenteram.

Semenjak Mangkubumi Jayanegara wafat tahun 1602, suasana Banten mulai dirundung oleh kemelut yang menyeret kelembah kesuraman. Rasa iri dan ambisi mewarnai pangeran-pangeran Banten - mereka mulai bertindak sendiri-sendiri - kontrol pun terasa mulai mengendor. Pemberontakan bermunculan di sana-sini sehingga boleh dikatakan periode ini merupakan periode terburuk bagi Banten saat itu.

Diluar istana (pada sisi lain) pengaruh Asing mulai terasa akibat kebijaksanaan-kebijaksanaan Mangkubumi (pengendali kesultanan) pengganti Jayanagara, yakni ayah tiri Pangeran sendiri yang begitu terbuka terhadap mereka.

Suasana bertambah mendung, kekacauan terus memperburuk keadaan. Mangkubumi sudah tidak mampu lagi mengendalikan dan mengantisipasi keadaan, kekuasaannya hanya sebatas lingkup istana, sedangkan di luar istana para pangeranlah yang berkuasa. Keadaan seperti ini berawal dari kehadiran Mangkubumi yang memancing rasa curiga dan iri hati beberapa pangeran lain yang akhirnya pengkhianatan pun terjadi dimana-mana.

Aksi pengkhianatan itu berhasil melumpuhkan Mangkubumi dan membunuhnya. Terbunuhnya Mangkubumi ini bukan berarti menghentikan kemelut yang merundung Banten, akan tetapi justru menarik minat dan ambisi untuk menduduki jabatan terhormat tersebut atau bahkan merebut sama sekali tahta kesultanan Banten. Sikap demikian ini ditunjukkan oleh Pangeran Kulon (cucu Maulana Yusuf) yang di bantu pangeran Singaraja dan Tubagus Prabangsa yang berambisi menduduki tahta kesultanan.

Aksi pemberontakan bisa dipadamkan berkat kerja sama antara pasukan Sultan, pasukan Pangeran Ranumanggala dan bantuan Pangeran Jayakarta dan berakhir dengan perdamaian.

Sebagai pengganti jabatan Mangkubumi diangkatlah Pangeran Arya Ranumanggala (putra Maulana Yusuf dari isteri selir). Setelah memegang jabatan ia segera mengadakan penertiban-penertiban, baik keamanan dalam negeri maupun merekonstruksi kebijaksanaan Mangkubumi sebelumnya terhadap pedagang-pedagang Eropa. Pajak ditingkatkan terutama untuk Kompeni. Tindakan ini diambil agar para pedagang Asing enyah dari bumi Banten karena ia telah menangkap maksud-maksud

mereka yang bukan hanya berniaga tetapi hendak mencampuri urusan dalam negeri.

Tindakan tegas Arya Ranumanggala ini akhirnya memaksa Kompeni untuk memalingkan orientasi niaganya ke Jayakarta. Di Jayakarta mereka disambut ramah oleh Pangeran Wijayakrama dengan suatu dalih kedatangan mereka akan meramaikan pelabuhan Sunda Kelapa yang nantinya mampu mengimbangi pelabuhan Banten.

Melihat hubungan intim Pangeran Jayakarta dengan Kompeni terusiklah hati Mangkubumi Arya Ranumanggala sebagai pemegang kendali Banten yang membawahi Jayakarta untuk menghancurkan benteng-benteng asing baik Belanda maupun Inggris yang ada dikawasan Banten. Maka diutuslah Pangeran Upatatih untuk mengemban amanat ini. Dalam pada itu orang-orang Inggris dapat didesaknya hingga kembali ke kapal mereka selanjutnya pasukan juga bisa mendesak Belanda; sementara Belanda tetap defensif dan tidak mau menyerah, bantuan dari Maluku tiba.

Setelah bantuan itu datang (dipimpin J.P. Coon) pada bulan Maret 1619 kepungan prajurit Banten tak ada artinya lagi dan mereka kembali dengan membawa kekecewaan. Saat itulah secara resmi Jayakarta dikuasai oleh Kompeni dan dirubah namanya menjadi Batavia.⁹

Sejak peristiwa itu kontak senjata antara Banten dengan Kompeni agak tenang, walaupun secara kecil-kecilan masih tetap berlanjut. Hal ini disebabkan karena faktor intern istana; peralihan kekuasaan dari Mangkubumi Arya Ranumanggala (sebagai wali Sultan selama belum dewasa) kepada Sultan Abdul Mufakhir yang sudah menjadi dewasa serta adanya usaha Mataram untuk menganeksasi Banten melalui perantaraan Cirebon. Kontak senjata antara Banten-Cirebon yang terjadi tahun 1650 yang kemudian terkenal dengan “peristiwa Pagarage” atau “peristiwa Pacerebonan” walau dapat dimenangkan pihak Banten namun cukup membuat Banten mencurahkan segala perhatiannya.¹⁰

Kontak senjata antara Banten-Kompeni menjadi aktif kembali setelah Sultan Ageng Tirtayasa menggantikan kakeknya yang meninggal pada tahun 1651. Ia berkuasa di Banten (Sorosowan) mulai tahun 1651-1676 setelah itu karena ada perbedaan dengan putranya Sultan Haji ia terpaksa

⁹ *Ibid.*, hal. 46.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 52.

pindah ke Tirtayasa dan menyusun kekuatan di sana untuk mengadakan penyerangan terhadap Kompeni.

Keadaan Banten semenjak diperintah Sultan Ageng Tirtayasa lebih baik lagi, baik di bidang politik, sosial budaya, terutama perekonomiannya. Dalam bidang perdagangan Banten mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan dagangnya dengan Persia, Surat, Mekkah, Karamandel, Benggala, Siam, Tonkin dan China cukup mengancam kedudukan VOC yang bermarkas di Batavia.¹¹

Sebagai seorang yang taat dalam beragama ia sangat antipati kepada Belanda. Penyerangan secara gerilya beliau lancarkan melalui darat dan laut untuk mematahkan kubu pertahanan Belanda yang bermarkas di Batavia. Aksi teror dan sabotase yang diarahkan kepada kapal-kapal dagang Kompeni merupakan kendala yang sangat membahayakan bagi Belanda.

Kurang lebih dua puluh tahun lamanya Banten merasakan suasana aman dan tentram dibawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa menjadi berubah setelah putra sulungnya Sultah Abu Nas'r Abdul Kahar atau Sultan Haji kembali dari tanah suci (1676) sebab ia lebih berpihak kepada Kompeni dibanding orang-orang yang dekat dengan ayahnya. Ia semakin mudah dipengaruhi Kompeni, model hidupnya pun mencerminkan kehidupan orang Eropa pada umumnya. Konsekuensinya rakyat jadi korban.

Pada tahun 1680 Sultan Ageng Tirtayasa benar-benar mengalami kesulitan sebab putranya telah membelokkan serta memotong politiknya. Akhirnya karena dirasa sulit untuk meluruskan jalan pikiran anaknya yang telah terseret negosiasi yang dilakukan Kompeni ia memutuskan untuk hijrah ke Tirtayasa dan membentuk front di sana beserta pengikut setianya. Karena itulah nama Abu Fath Abdul Fattah terkenal dengan sebutan Sultan Ageng Tirtayasa.¹²

Akan tetapi bagaimanapun sulitnya (harus berhadapan dengan putranya sendiri), ia tetap tegar pada pendiriannya. Ia beserta para pengikut setianya terus melancarkan serangan kepada Kompeni yang kian intensif pengaruhnya terhadap istana Surosowan. Pada 27 Pebruari 1682

¹¹ Kartodirdjo, *Sejarah Nasional*, III, hal. 361.

¹² Suasana perbedaan persepsi antara Sultan Haji (sebagai anak) dengan Sultan Ageng Tirtayasa (sebagai ayah) di sini ialah merupakan hasil nyata politik Kompeni yang hendak memecah belah (*divide et impera*) bangsa.

istana Surosowan diserbu, namun berkat bantuan Kompeni Sultan Haji masih bisa mempertahankan kekuasaannya.¹³

Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa baru berhenti setelah ia ditangkap dan dipenjarakan oleh Kompeni sampai wafatnya tahun 1692.

Dengan ditanda tangannya perjanjian antara Kompeni dan Sultan Haji pada Agustus 1682, maka kekuasaan mutlak Sultan Banten atas daerahnya berakhir, sedang penguasa sebenarnya adalah Kompeni. Sultan di sini hanya simbol belaka.

Pengaruh Belanda semakin terasa intensif setelah Daendeles menganeksasi Banten pada tahun 1808, Sultan dan alat-alat politiknya dipertahankan akan tetapi berada dibawah pengawasan ketat pemerintah Belanda. Para penguasa Banten diperbolehkan menggunakan gelar Sultannya, akan tetapi hakekatnya mereka hanya boneka belaka, sebab Banten sudah termasuk ke dalam wilayah Belanda.

B. Sistem politiknya

Sebagaimana kerajaan tradisional lainnya, kekuasaan Sultan di sini mempunyai otoritas tertinggi serta mempunyai hak prerogratif penuh atas segala urusan, baik politik atau lainnya. Pengakuan dan pengukuhan atas jabatan Sultan ditetapkan berdasarkan warisan.

Dalam melaksanakan tugasnya (bidang administratif pemerintahan) Sultan dibantu seorang Mangkubumi dan beberapa pejabat bawahannya; mereka ini terdiri dari golongan elite yang kebanyakan bukan golongan pangeran atau kaum bangsawan lain. Adapun khusus untuk kerabat Sultan atau kaum bangsawan menempati strata lebih rendah di bawah Sultan dan lebih tinggi di atas pejabat administratif.

Untuk urusan birokrasi pusat dikepalai oleh seorang patih (wazir besar) yang dibantu dua orang kliwon yang juga disebut Patih, sedang pengadilan dan keagamaan diserahkan kepada Fakih Hajamuddin. Setingkat di bawahnya adalah para punggawa yang menangani bidang administrasi dan pengawasan terhadap perekonomian negara. Syahbandar adalah pejabat negara yang ditugasi untuk mengawasi perdagangan luar negeri di kota-kota pelabuhan. Seajar dengan pejabat-pejabat di kota-kota pelabuhan ialah para kepala daerah.¹⁴

¹³Kartodirdjo, *Sejarah Nasional*, hal. 362.

¹⁴Ambary, *Sejarah Banten*, hal. 98.

Untuk mencermati perjalanan sejarah perpolitikan kerajaan Banten, internal maupun eksternal marilah kita simak fase-fase berikut ini.

1. Fase Perintisan

Pada mulanya penaklukan atas Banten oleh Syarif Hidayatullah tahun 1525 atau 1526 hanya bermotifkan politik, perluasan wilayah Demak dan penyebaran agama Islam dikawasan Jawa Barat yang masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Hindu Pajajaran akan tetapi setelah Sunan Gunung Jati pindah ke Cirebon dan Banten diserahkan kepada putranya, Maulana Hasanuddin, Banten diberi hak penuh untuk membentuk kesultanan bawahan Demak dengan Maulana Hasanudin sebagai sultan pertamanya bahkan tatkala kekuasaan Demak pindah ke Pajang (Jaka Tingkir) Banten yang dependen pada Demak diproklamasikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin sebagai kesultanan yang independen.

Selama 18 tahun lamanya ia berkuasa di Banten (1552-1570) banyak sekali kemajuan yang dicapai. Pusat pemerintahan yang dulunya Banten Girang karena kepentingan strategi politik dan perdagangan ia pindahkan ke Surosowan. Kekuasaan Banten saat itu meliputi seluruh Banten, Jayakarta, Krawang, Lampung dan Bengkulu. Ini suatu bukti bahwa Banten yang baru saja tampil di permukaan telah memiliki sistem politik yang bagus.

2. Fase Perkembangan

Fase ini diwarnai dengan tampilnya Maulana Yusuf menggantikan ayahnya. Berada di bawah kuasanya Banten memperoleh popularitas dan gengsi yang tinggi di percaturan politik. Kerajaan Hindu Pajajaran yang merupakan simbol kejayaan Pasundan saat itu bisa diruntuhkan oleh kekuatan Maulana Yusuf yang bahu membahu dengan ulama. Dengan demikian maka lingkup kekuasaan Banten menjadi semakin luas.

3. Fase Krisis Politik dan penuh intrik

Meninggalnya Maulana Yusuf tahun 1580 merupakan awal terjadinya intrik politik di lingkungan istana, sebab ketika beliau wafat putra mahkota Pangeran Muhammad baru berusia 9 tahun. Momentum ini dimanfaatkan oleh Pangeran Arya Jepara (adik Maulana Yusuf) untuk menampilkan dirinya sebagai pengganti kakaknya. Ia menuntut kepada pembesar kerajaan Banten untuk menobatkan dirinya sebagai penguasa Banten sampai pangeran yang berwenang mencapai dewasa. Karena

kehendaknya tidak dikabulkan kadli sebagai wali Sultan maka pertempuran pun tidak dapat dihindarkan lagi. Dalam pertempuran itu Pangeran Jepara dan prajuritnya kalah, akhirnya ia kembali ke Jepara dengan tangan hampa.

Setelah intrik politik yang ditimbulkan Pangeran Arya Jepara usai, suhu politik Banten mengalami perubahan yang serius; musyawarah kadli memutuskan sebagai pelaksana pemerintahan darurat sementara menunggu usia Sultan dewasa adalah Mangkubumi.

Perubahan sistem ini kemudian membawa pengaruh yang besar bagi perjalanan politik di kesultanan Banten karena bagaimanapun tampilnya Mangkubumi sebagai pucuk pelaksana pemerintahan telah memancing rasa cemburu dan iri keluarga bangsawan, terutama kalangan pangeran.

Suasana politik Banten menjadi semakin suram setelah gugurnya Maulana Muhammad dalam ekspedisi penyerangan Palembang dalam usia yang relatif muda. Karena putra mahkota masih 5 bulan usianya, maka untuk yang kedua kalinya kendali pemerintahan Banten dipegang oleh Mangkubumi.

Secara otomatis jabatan mangkubumi menjadi incaran, banyak pangeran yang berambisi menduduki jabatan bergengsi itu. Sebagai akibatnya terjadilah pemberontakan-pemberontakan disana-sini yang membuat situasi politik menjadi melemah.

Upaya ekspansi tidak mungkin bisa dilaksanakan saat itu karena untuk menyelesaikan persoalan intern sendiri cukup banyak menyita waktu sementara di luar istana Kompeni dan orang Eropa lainnya mulai bersiap untuk memasang politik adu dombanya.

Yang sangat tragis (akibat suhu politik yang tidak sehat) ialah Jayakarta, yang merupakan pelabuhan andalan, terpaksa jatuh ketangan Belanda pada tahun 1619.

4. Fase Rekonstruksi

Naik tahtanya Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Sultan Banten menggantikan kakeknya Sultan Abdul Mufakhir merupakan angin segar bagi kehidupan politik di Banten.

Pembenahan ke dalam serta penataan aparatur pemerintahan secara tertib adalah langkah awalnya untuk mengembalikan Banten menjadi kesultanan yang berwibawa, terutama di mata Kompeni yang mulai berani macam-macam di Banten. Setelah itu baru diantisipasi faktor-faktor lain

yang seolah-olah menjadikan Banten lumpuh tak berdaya. Jawaban yang ditemukan ialah adanya penetrasi dan infiltrasi orang asing di bumi warisan Sunan Gunung Jati. Karenanya jika Banten ingin mempunyai pengaruh yang kuat sebagaimana periode-periode awal, maka harus mampu mengusir Kompeni dari wilayah Banten.

Segera Sultan yang anti campur tangan asing itu meluncurkan serangan-serangannya terhadap Kompeni. Teror sabotasi dan gerilya adalah taktik strategi politiknya untuk membuat repot Belanda. Kontak senjata antara kedua belah pihak baik di darat maupun di laut sering terjadi tanpa dapat dihindari sehingga amatlah wajar apabila Belanda menganggap Banten saat itu sebagai musuh yang amat berat.

5. Fase Lepasnya Kesultanan Banten Dianeksasi Belanda

Sistem perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa yang sudah mulai menciut nyali Belanda akhirnya mendapat hambatan setelah anaknya Sultan Haji yang baru saja tiba dari tanah suci memotong arah politiknya serta kompromi dengan Kompeni untuk menghancurkan ayahnya sendiri. Kerjasama antara Sultan Haji dengan Kompeni akhirnya bisa memadamkan perlawanan-perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa beserta pengikut setianya akhirnya ditangkap dan dipenjarakan kompeni hingga wafatnya tahun 1692.

Surutnya perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa dan naik tahtanya Sultan Haji pada dasarnya adalah kemenangan Kompeni yang berhasil mengadu domba antara dua Sultan yang bertalian darah. Terlebih setelah ditandatanganinya perjanjian antara Sultan Haji dengan Kompeni (1682) maka Banten betul-betul menjadi kekuasaan Kompeni sebab Sultan hanya simbol belaka.

6. Fase Perlawanan Rakyat yang dipelopori Ulama

Setelah Banten dikuasai Kompeni, sementara sultan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menuruti kebijaksanaan Kompeni maka muncullah pergerakan perlawanan serta pemberontakan yang terjadi di seluruh pelosok Banten yang tidak puas terhadap Belanda yang telah mencaplok hak asasi rakyat Banten.

Rata-rata pimpinan pergerakan perlawanan itu adalah ulama (elite agama) seperti Kiai Wakhia, Kiai Wasyid dan lain-lain. Mereka itulah yang menyadarkan umat untuk merebut harga diri dan hak asasi rakyat Banten yang dirampas orang-orang kafir dari dunia Barat.

C. Kedudukan dan Peran Serta Ulama

Kedudukan sultan-sultan Banten diakui bukan saja sebagai kepala pemerintahan yang memiliki otoritas tertinggi tetapi juga sebagai kepala agama di wilayahnya dengan demikian maka lembaga-lembaga keagamaan mendapat perhatian, pengakuan serta perlindungan penuh dari sulta, terutama ulamanya. Mereka termasuk kelompok kelas elite yang memiliki pengaruh besar terhadap jalannya pemerintahan ataupun masyarakat.

Tidak sedikit kaum ulama yang ditempatkan di posisi terhormat sebagai suatu sistem dalam kerangka umum administrasi negara, baik pusat maupun di tingkat lokal (daerah) disamping kelas administrasi sekuler bahkan terdapat suatu lembaga tinggi pemerintah yang secara spesifik pengelolaannya diserahkan kepada kaum ulama yaitu "Mahkamah Agung" dengan gelar resminya Fakih Hajamuddin.

Disamping kaum elite agama yang terlibat langsung dalam kerangka sistem administrasi pemerintah juga terdapat kelas elite agama partikelir (tidak memiliki kekuasaan dalam birokrasi pemerintahan) mereka juga mendapat perlindungan dari Sultan.

Melihat kedudukan ulama begitu terhormat, bukan saja sebagai kaum rohaniawan tetapi juga menduduki jabatan tinggi pemerintahan, maka peranannya pun dalam ikut serta menjaga stabilitas dan harmonisasi pemerintahan sangatlah besar.

Ketika terjadi peristiwa penyerbuan atas Pakuan Pajajaran Hindu pada masa pemerintahan Maulana Yusuf, peran ulama sangat besar, bukan saja sebagai pemberi spirit tetapi juga terlibat dalam pertempuran.

Suasana harmonis antara ulama dan umara' Berjalan dari masa kemasa hingga terjadinya aneksasi Belanda atas Banten. Kesempatan ulama (kaum elite agama) untuk berpartisipasi dalam soal-soal kebijaksanaan pemerintah sudah tidak ada peluang, semuanya sudah diatur oleh Belanda. Peranan Pejabat-pejabat agama seperti penghulu, personil masjid semakin dipersempit dan bahkan banyak diduduki pejabat-pejabat biasa dengan pengawasan ketat dari pemerintah Belanda. Pembatasan terhadap jama'ah haji juga dilakukan, tetapi jumlah peserta dalam setiap tahunnya terus meningkat. Sebagai akibat dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mendiskreditkan kaum elite agama (ulama) itu serta adanya penyunatan hak asasi rakyat, maka bangkitlah ulama-ulama Banten untuk mengadakan perlawanan terhadap Kompeni Belanda.

IV KERAJAAN PALEMBANG

A. Latar Belakang Berdirinya

Sejarah kerajaan Palembang atau kesultanan Palembang terjadi dalam abad ke-17 M dan ke-18 M sampai dengan awal abad ke-19 M. Tempatnya adalah di kota Palembang dan sekitarnya, baik disebelah sungai Musi maupun di hulu dan anak-anaknya, yang dikenal dengan Batanghari Sembilan. Letaknya tidak terlalu jauh dari Kuala (- 90 KM) yang bermuara di selat Bangka.

Kota Palembang semula termasuk wilayah kerajaan Budha Sriwijaya yang berkuasa dari tahun 683 M sampai kira-kira tahun 1371 M. Catatan mengenai waktu berakhirnya kerjaan Sriwijaya bermacam-macam, yang pasti setelah runtuhnya kerajaan ini mengalami kekosongan kekuasaan, dan menjadi taklukan kerajaan Majapahit pada pertengahan abad ke-15 sampai tahun 1527 M. Salah seorang adipati Majapahit yang berkuasa di Palembang adalah Aryo Damar (1455-1478), putra dari Prabu Brawijaya (1447-1451) Aryo Damar kawin dengan putri Campa bekas istri Brawijaya, Sri Kertabumi (1474-1478) dengan membawa anak Raden Fatah yang lahir di Palembang dan dibesarkan oleh ayah tirinya yakni Aryo Damar (1455). Kemudian ia menjadi pendiri kerajaan Demak pada tahun 1478.

Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit Palembang menjadi daerah pelindung (protektorat) dari kerajaan Demak-Pajang dan Mataram di Jawa. Semula hubungan ini berjalan baik dan teratur, namun perkembangan keadaan membawa perubahan, khususnya semasa kerajaan Mataram. Dalam sejarah kerajaan Mataram nampak sekali, bahwa hubungan antara pusat dan daerah tidak selalu berjalan dengan baik, sebagai mana pengalaman penguasa-penguasa Palembang pra kesultanan, yang mendapat perlakuan tidak menenangkan dalam hubungannya dengan kerajaan Mataram, begitu juga Kyai Mas Endi, Pangeran Ario Kesumo Abdirronim sesudah menggantikan kedudukan kakaknya. Pangeran Sedo Ing Rajek sebagai penguasa Mataram di Palembang mengalami hal yang sama, dimana beliau pada tahun 1668 mengirim utusan ke Mataram, tetapi ditolak oleh Amangkurat I. Dengan adanya hal ini maka beliau memelaskan ikatan dengan Mataram. Maka menjadilah Palembang berdiri sendiri sebagai kesultanan Palembang Darussalam.¹

Kapan hal ini mulai terjadi, tidak didapatkan keterangan-keterangan yang pasti. Disebutkan oleh P. Deroo Defaille dalam bukunya *Dari Zaman Kesultanan Palembang* sebagai berikut : Pangeran Ratu dalam tahun 1675 memakai gelar Sultan dan dalam tahun 1681 namanya Sultan Djamaluddin dan ternyata orangnya sama dengan Sultan Ratu Abdurrahman dari tahun 1690 yang dalam cerita terkenal dengan Sunan Tjadebalang, yang sebetulnya Tjandiwalang.

B. Masa Kejayaannya

Palembang dalam bagian kedua abad ke-18 telah menuju ke hari depan yang baik, yaitu pada masa Sultan Susuhunan Mahmud Badaruddin II. Ia menjalankan pemerintahan secara bijaksana, perdagangan berkembang pesat dan timah telah memperkaya kerajaan.

Di Kesultanan Palembang, hak pemakaian tanah diserahkan kepada marga dengan menghormati batas-batas antara marga yang telah ditetapkan, keputusan hukuman dalam kesultanan Palembang terletak ditangan raja atau pembesar-pembesar kerajaan. Jika terjadi perselisihan diantara marga raja dapat bertindak sebagai penengah, demikian juga dalam perselisihan masalah tanah, Raja berhak menerima jasa-jasa dari

¹Marwati Djuned, *Sejarah Nasional Indonesia*., jilid IV hal.

penduduknya. Selain pajak, pendapatan lain kesultanan adalah “di bantukan” yakni suatu perdagangan monopoli primitif yang tidak berdasarkan pengertian melayu. Dalam sistem ini raja atau pembesar-pembesar kerajaan tertinggi membeli barang dengan harga yang murah dari harga pasar. Inilah yang disebut dengan “beli-beli natal”. Pendapatan yang terpenting adalah dari monopoli yang ditetapkan, yaitu duapuluh ribu pikul dalam setahun. Keuntungan dari hasil jual beli inilah yang dipergunakan oleh sultan untuk membangun kembali keraton.

C. Pemerintahan, Ekonomi dan Politik

1. Pemerintahan, Ekonomi dan Politik

Wilayah kesultanan Palembang Darussalam kira-kira meliputi wilayah keresidenan Palembang dulu pada waktu pemerintahan Belanda ditambah dengan Rejang-Amput Petulai (lebong) dan Belalu, disebelah selatan dari danau Ranau.

Pusat pemerintahan kesultanan berada di kota Palembang dimana pemerintahan dikendalikan oleh putra mahkota, yang juga penasihat sultan langsung, wakil dan pengganti.

2. Ekonomi

Perekonomian kesultanan Palembang, sesuai dengan letaknya, sangat dipengaruhi oleh perdagangan luar dan dalam negeri. Perdagangan diadakan dengan pulau Jawa, Riau, Malaka, negri Siam dan negri Cina. Disamping itu, datang pula dari pulau-pulau lainnya perahu-perahu yang membawa dan mengambil barang dagangan. Komoditi yang terpenting adalah hasil pertambangan timah.

3. Politik

Politik yang dijalankan di kesultanan selama berdirinya ±50tahun, membuktikan telah berhasilnya menciptakan pemerintahan yang stabil, dimana ketentraman dan keamanan penduduk dan perdagangan terpelihara dengan baik. Demikian juga hubungan dengan negara-negara tetangga umumnya terjalin dengan baik, hanya ada satu kali perang saja sewaktu pra-kesultanan pada tahun 1596 dengan Banten yang berlatar belakang pertikaian ekonomi untuk memperebutkan pangkalan perdagangan di selat Malaka.

Prestasi politik pada masa pemerintahan Sultan Susuhunan Abdurrahman yang paling menentukan bagi perkembangan kesultanan

Palembang Darussalam, adalah kebijaksanaannya untuk melepaskan diri dari ikatan perlindungan (protektorat) Mataram kira-kira pada tahun 1675 tanpa menimbulkan penindasan dan peperangan. Hubungannya dengan Mataram tetap terpelihara dengan baik.

Yang mendapat tantangan berat adalah politik dalam menghadapi imperialisme dan kolonialisme Eropa (Belanda dan Inggris) dengan kelebihan teknologi alat perangnya dan kelicikan politiknya, sehingga banyak mendatangkan kerugian kepada pihak kesultanan, dan akhirnya mengakibatkan hilangnya eksistensi kesultanan itu sendiri. Politik imperialis dan kolonialis ini yang dikenal dengan "Belanda minta tanah" dengan taktik tipu muslihatnya *divide et impera*.

D. Peran Ulama di kesultanan Palembang

Sejarah penyebaran agama Islam di kesultanan ini tak terlepas dari seorang yang lazim dinamakan Kyai atau guru mengaji. Pada periode pemerintahan Kyai Mas Endi Pangeran Ario Kesumo Abdurrahman (1659-1706) terkenal seorang ulama yang bernama K.H. Agus Khotib Komad seorang ahli tafsir Al-Qur'an dan Fiqih, Tuan Faqih Jalaluddin mengajarkan ilmu Al-Qur'an dan Ilmu Ushuluddin seorang ulama terkenal pada periode Sultan Mansur Joyo Ing Lago (1700-1714). Ulama ini masih menjalankan dakwahnya hingga masa pemerintahan Sultan Agung Komaruddin Sri Terung (1714-1724) juga pada masa Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo (1724-1758) sampai akhir hayatnya pada tahun 1748. Sebulan setelah beliau wafat Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo mendirikan masjid untuk wakaf kaum muslimin pada tanggal 25 Juni 1748. Masjid tersebut masih ada hingga sekarang dan dikenal dengan nama Masjid Agung.

Pada masa Sultan Susuhunan Ahmad Najamuddin Adikesumo (1758-1776) lahir di Palembang seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdussomad Al-Palembani, beliau aktif mengembangkan agama Islam pada masa Sultan Muhammad Bahauddin (1776-1803). Beliau memiliki reputasi internasional, pernah belajar di Mekkah, dan pada abad ke-18 M. ia kembali ke Palembang dengan membawa mutiara baru dalam Islam. Mutiara tersebut adalah Metode baru untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ketika ia berada di Mekah sempat hubungan korespondensi dengan Pangeran Mangkubumi di Yogyakarta, Mangkunegara di Susuhunan Prabu Djaka di Surakarta. Surat-surat yang dikirim kepada penguasa

formal tradisional, tidak hanya berisikan soal-soal ilmu agama saja tapi juga hal-hal yang menyangkut politik dalam kaitannya dengan kolonialisme Belanda. Dengan demikian ia telah memberikan inspirasi baru berdasarkan doktrin agama, untuk membangkitkan kembali rasa patriotisme dalam menentang penjajah.

Terlepas pada suatu pemikiran apakah beliau termasuk golongan taswuf Al-Ghozali atau Wahdatul wujud yang pernah diajarkan oleh Ibnu Arabi, Beliau telah menerjemahkan kitab karangannya sendiri yang bernama Sair al-Salikin dan Hidayat al-Salikin yang sampai sekarang masih banyak dibaca di negara-negara Asean yang meliputi Philipina selatan, Brunai, Malaysia, Thailand Selatan, Singapura dan Indonesia. Begitu penting dan terhormatnya kedudukan ulama disamping sultan, sampai-sampai ulama mendapat tempat tersendiri disamping sultan. Dapat pula kita perhatikan posisi makam-makam para sultan Palembang disampingnya terlihat makam ulama-ulama beserta permaisuri.²

E. Masa Kemunduran

Setelah meninggalnya Sultan Baharuddin pada tahun 1804 yang memerintah kurang lebih 27 tahun lalu digantikan oleh putranya Sultan Mahmud Badaruddin. Ia merupakan raja yang terakhir memerintah secara despotis, punya kepribadian yang kuat, berbakat serta terampil dalam diplomasi atau strategi perang. Juga perhatian luas dalam berbagai bidang diantaranya pada bidang sastra.

Dengan kemerosotan VOC pada akhir abad ke-18 praktis monopolinya di Palembang tidak dapat dipertahankan lagi dan faktorainya di tempat itu hampir lenyap. Krisis ekonomi dan politik yang dihadapi VOC dan kemudian pemerintah Belanda mempercepat peralihan kekuasaan ke tangan Inggris.

Palembang jatuh ke tangan ekspedisi Inggris Gillespie pada tanggal 24 April 1812. Sultan sempat mengungsi ke pedalaman.

Pimpinan pertahanan kerajaan ada ditangan Pangeran Adipati Ahmad Najamuddi, seorang saudara sultan yang tidak menunjukkan loyalitasnya kepada kakaknya, bahkan bersedia berunding dengan Inggris pada tanggal 17 Mei 1812 yang menentukan bahwa P.A. Ahmad

²Gadjannata K.H.O. Sri-Edi Swasono, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*, hal. 212.

Najamuddin menjadi sultan Palembang dengan syarat Palembang harus menyerahkan Bangka dan Belitung kepada Inggris. Sementara itu Sultan Badaruddin membangun pertahanan yang kuat di hulu sungai Musi, bermula di Buaya Langu setelah serangan ekspedisi Inggris gagal terhadap kubu tersebut, maka pertahanan dipindahkan lebih ke hulu lagi yaitu di Muara Rawas. Setelah dengan aksi militer Inggris mengalami kegagalan maka ditempuhnya jalan diplomasi dan mengirim Robinsin untuk berunding. Pada tanggal 29 Juni 1812 ditandatangani perjanjian yang menetapkan bahwa sultan Badaruddin diakui sebagai sultan Palembang dan P.A. Ahmad Najamuddin diturunkan dari tahtanya.

Pada tanggal 15 Juli sultan Badaruddin tiba di Palembang dan bersemayam di keraton besar sedang P.A. Ahmad Najamuddin pindah kekeraton lama. Terangnya permainan politik Inggris semakin mengurangi kekuasaan sultan dan kondisi kontrak lebih diperberat. Waktu Belanda menerima kembali daerah jajahannya dari Inggris, politik langsung membalik situasi seperti yang diciptakan oleh Inggris. Sultan Ahmad Najamuddin adalah penguasa yang lemah sedang sultan Badaruddin menguasai politik. Eksploitasi feodalistis dikalangan keluarga sultan merajalela, banyak perampokan dalam kekosongan kekuasaan di daerah, dan akhir situasi mirip dengan anarki. Muntinghe selaku kuasa usaha Belanda bertekad menanam kekuasaan yang kuat di Palembang maka untuk tujuan itu disodorkan kontrak dengan kedua tokoh tersebut (20-24 Juni 1818). Meski kesultanan tidak dihapus, namun kekuasaan sultan lambat laun semakin berkurang. Sultan Palembang dan saudaranya untuk kedua kalinya diturunkan dari tahtanya. Keduanya mendapat daerah kekuasaan untuk diambil hasilnya sebagai sarana penghidupannya, sedang sebagian besar daerah Palembang dikuasai Belanda.

Najamuddin yang dibelakangkan oleh intervensi Belanda, berusaha memperoleh bantuan Inggris. Usaha Raffles untuk memberi bantuan yang diharapkan itu gagal, dan akhirnya ia sebagai faktor yang membahayakan pemerintahan Belanda diamankan di Batavia.

Sementara di daerah pedalaman bergolak terus, antara lain karena tercipta vakum politik dan ruang sosial yang leluasa bagi unsur-unsur bawah tanah untuk beragitasi. Orang-orang minangkabau dan Melayu yang menjadi pengikut Sultan Badaruddin sewaktu dia mengungsi ke hulu sungai Musi melakukan perlawanan terhadap ekspedisi Belanda yang terpaksa kembali ke Palembang tanpa dapat mengamankan daerah hulu.

Ada kecurigaan pada Muntinghe bahwa sultan Badaruddin ada dibelakang pergolakan di hulu sungai Musi. Beliau dituntut agar meredakan para pemberontakan, lagi pula putra mahkota agar diserahkan untuk dipindah ke Batavia. Kegentingan memuncak waktu perundingan antara Muntinghe dan sultan menemui jalan buntu. Sultan menolak untuk menyerahkan putra mahkota pada tanggal 12 Juni 1819, kapal-kapal VOC ditembaki hingga Muntinghe meninggalkan Palembang menuju ke Muntok.

Pergolakan menjalar ke Bangka, Lingga dan Riau, dimana aksi-aksi perlawanan terhadap Belanda Terjadi, kesemuanya karena mendapat angin dari Palembang yang berhasil mengenyahkan Belanda. Sultan Badaruddin sebagai ahli strategis tetap waspada dan membangun pertahanan kuat di sepanjang sungai Musi dan Muara sampai Palembang.

Sebelum mengirim ekspedisi, Belanda mengangkat putra Ahmad Najamuddin, yaitu Prabu Anom sebagai sultan dengan gelar Ahmad Najamuddin.

Ekspedisi mulai menyerang pertahanan di Plaju pada tanggal 20 Juni 1821, tetapi dipukul mundur oleh pasukan Palembang. Baru pada serangan kedua pada malam 24 Juni Plaju dapat direbut, dan Palembang dapat terbuka bagi angkatan perang Belanda. Dalam menghadapi situasi itu, sultan Badaruddin mencoba berunding dan tidak lagi melakukan perlawanan. Tanggal 1 Juni keraton diduduki Belanda, kemudian baik kekuasaan sipil maupun militer ada ditangan Belanda dan pada tanggal 12 Juli Residen Overste Keer secara resmi memegang jabatannya dan empat hari kemudian sultan Ahmad Najamuddin dinobatkan.

Pemberontakan dibawah P. Abdurrahman dan Jayaningrat pada tanggal 22 November 1821 yang gagal memberi alasan kepada Belanda untuk menamatkan kesultanan Palembang. Susuhunan (ayah sultan Ahmad) diamankan ke Batavia sedang sultan mengungsi ke hulu sungai Musi untuk meneruskan perlawanannya. Setelah bertahan selama delapan bulan ia pun ditawan dan diasingkan di Manado dimana ia meninggal pada tahun 1844. Dengan demikian berakhirilah dinasti Palembang yang berkuasa selam beberapa abad itu.

V KERAJAAN TERNATE

A. Asal-usul Kerajaan Ternate

Islam masuk ke daerah Maluku secara resmi pada abad IX, yang pada waktu itu dibawa oleh orang-orang Arab, Persi dan juga orang Melayu yang berdatangan ke sana sejak abad ke-5 atau abad ke-11 Masehi. untuk mengetahui lebih mendalam tentang kerajaan Ternate ini ada baiknya apabila terlebih dulu kita mengetahui keberadaan wilayahnya, yang merupakan salah satu faktor penunjang bagi kemajuan dan perkembangan kerajaan Ternate di masa-masa selanjutnya nanti. Kerajaan Ternate berada di kepulauan Maluku yang merupakan salah satu dari empat kerajaan yang ada di sana, yaitu Kerajaan Tidore, Kerajaan Bacan, Kerajaan Jailolo dan Kerajaan Ternate sendiri yang akan dibahas.

Sejak dulu Maluku terkenal dengan semerbak bunga cengkehnya, karena itulah yang membuat orang-orang Eropa berdatangan dan ingin menguasainya. Datangnya pengaruh bangsa Barat, didahului oleh pengaruh bangsa Timur Tengah yang lebih awal datangnya ke negeri ini, sehingga mereka saling berlomba untuk mendapatkan hasil bumi yang melimpah ruah. Bangsa Timur Tengah disamping bertujuan mencari cengkeh (rempah-rempah), mereka juga bertujuan untuk menyebarkan Islam di Kerajaan Maluku.

Kedatangan Islam ke Indonesia bagian Timur, yaitu ke daerah Maluku tidak dapat dipisahkan dengan pusat lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional, yaitu : Malaka, Jawa dan Maluku.

Keadaan Maluku yang sekaligus kerajaan Ternate di dalamnya, bahwa tantangan yang dihadapi orang-orang Islam tidak lagi menghadapi kerajaan yang sedang mengalami perpecahan karena perebutan kekuasaan melainkan mereka hanya datang dan mengembangkan agama Islam dengan melalui perdagangan, dakwah dan melalui perkawinan menurut cara Islam.

Di kala Tume Paires dan Gallevao datang ke daerah tersebut terlihat masih banyak masyarakat yang belum masuk Islam, mereka masih percaya akan pengaruh nenek moyangnya dan mereka hidup dalam kelompok masyarakat yang dipimpin oleh para ketua kampung masing-masing.¹ Dengan keadaan yang demikian itu, maka orang Arab yang berada di daerah tersebut mulai tergerak untuk melaksanakan Islamisasi. Sebagian dari hasil Islamisasi yang dilakukan adalah dengan masuknya raja Ternate dalam Islam. Disebutkan pula bahwa yang mula-mula memeluk agama Islam adalah "Kolani" (gelar para raja Maluku sebelum Islam) yang bernama Gapi Baguna. Dialah yang telah menerima seruan Datuk Maulana Husin dan mempelajari Islam secara sungguh-sungguh. Disebutkan pula dalam catatan orang Ternate, bahwa raja itu setelah masuk Islam memakai nama "Marhum". Besar sekali kemungkinan bahwa nama Islam baginda bukan itu, sebab biasanya bila seorang raja setelah meninggal dunia baru disebut namanya dengan panggilan Marhum.² Sehingga panggilan atau gelar itu digunakan oleh pewaris kerajaan.

B. Situasi Kerajaan Ternate

Jauh sebelum kedatangan bangsa bangsa Barat, kepulauan Maluku telah di kenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah yang pada waktu itu nilainya sangat tinggi di banding dengan hasil bumi lainnya. Sejak datangnya bangsa Portugis dan Belanda ke daerah Maluku menjadikan daerah tersebut sebagai ajang perebutan kekuasaan terhadap rempah-rempah antara dua bangsa itu maupun dengan kerajaan lokal yang ada di kepulauan Maluku.

¹Nugroho Notosusanto, dkk., *Sejarah Nasional Indonesia III*, 1979, hal. 95

²Hamka, *Sejarah Umat Islam*, 1981, hal. 217

Pada akhir abad ke 16 kerajaan Ternate meluaskan kekuasaannya ke daerah Maluku Tengah yaitu di Hoamoal (P. Seram), dan di pulau-pulau kecil di sekitarnya (Buru, Manipang, serta Kelang dan Boanou) di mana motif yang sesungguhnya dalam ekspansi ini tidak jelas tetapi ada kemungkinan karena faktor perdagangan cengkeh, dan adanya persaingan dengan bangsa-bangsa Portugis yang menguasai daerah Maluku. Dengan bertambah maju dan berkembangnya akan penanaman rempah-rempah seperti pala, cengkeh, lada maka menyebabkan semakin tingginya minat bangsa asing untuk meraih dan merangkul seluruh kepulauan Maluku. Sehingga tidak asing lagi kalau kerajaan Ternate serta seluruh kerajaan yang ada di Maluku mengadakan perlawanan dan peperangan yang mana dalam usaha tersebut tak ketinggalan pula peran ulama' yang dengan gigihnya merintangi dan melawan penjajah yang hendak menguasai wilayah serta perekonomian negerinya.

Adapun tata susunan raja-raja yang berkuasa di kerajaan Ternate yaitu : ³

1. Zainal Abidin sebagai Sultan Ternate I
2. Sirullah sebagai Sultan Ternate II
3. Khairun sebagai Sultan Ternate III
4. Babullah sebagai Sultan Ternate IV

Keempat raja tersebut terkenal gigih dalam mempertahankan daerahnya dari serangan musuh yang datang dan ingin menguasainya, baik secara halus maupun terang-terangan.

Demikianlah situasi kerajaan Ternate dan kepulauan Maluku, baik itu terjadi pada awal berdirinya kerajaan Ternate maupun pada masa perkembangannya. Di bawah ini akan dibicarakan situasi kerajaan Ternate di berbagai bidang : bidang ekonomi, politik dan agama.

1. Situasi dalam bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, kerajaan Ternate tidak terlepas dari aspek-aspek dan hal-hal yang membawa ke arah kelangsungan kehidupan kerajaan tersebut. Pada masa pertumbuhan dan perkembangan Islam, sistem jual beli barang agaknya masih melanjutkan atau meneruskan tradisi lama, yakni "barter" yaitu tukar menukar barang dengan barang lain yang diperlukan antara penjual dengan pembeli, ada pula yang

³Hamka, *Sejarah Umat Islam*, hal. 220.

menggunakan alat-alat penukar konvensional yang lazim disebut uang.

Tradisi jual beli seperti ini hingga sekarang masih berlaku dalam masyarakat primitif di daerah pedalaman yang masih kolot, bahkan di Jawa, Sumatra dan lain-lain.

Perkembangan ekonomi di Ternate berjalan dengan pesat. Hal ini terlihat dengan banyaknya masyarakat yang menanam rempah-rempah, yang terkenal merupakan tanaman yang sangat mahal harganya dan banyak peminatnya, bukan saja di kalangan Indonesia sendiri, tetapi juga bangsa-bangsa asing yang datang ke Maluku. Terbukti dengan masuknya bangsa Portugis ke kepulauan Indonesia tepatnya Maluku pada awal abad ke-16 (1521) melalui Sulawesi dan berusaha menemukan jalur pelayaran dari Ternate menuju Malaka melalui Kalimantan Utara, ini terjadi pertama kali pada bulan Mei tahun 1522 oleh Garcia Henri Ques dan yang kedua dilakukan oleh Antonio de Abreo. Namun usaha tersebut nampaknya belum membuahkan hasil yang memuaskan, namun demikian bangsa Portugis tidak henti-hentinya mencari jalan agar usaha yang dilakukan itu berhasil. Dan akhirnya kerajaan Ternate (Maluku) dapat dikuasai bangsa Portugis, sehingga segala urusan mengenai perdagangan jatuh ke tangan bangsa Portugis. Keberhasilan ini dicapai berkat usahanya yang dilakukan pada tahun 1599 dengan bantuan armada yang memiliki persenjataan yang lengkap serta berbarengan dengan datangnya bangsa Belanda yang disambut oleh masyarakat Ternate yang oleh masyarakat Ternate Belanda bermusuhan dengan Portugis, padahal sebenarnya keduanya sama-sama sebagai bangsa penjajah.⁴

Kerajaan Ternate, seperti halnya kerajaan Islam yang lain juga telah mengenal politik dalam menjalankan pemerintahan. Dalam pergantian kekuasaan raja masih berlaku sistem turun temurun dan ini terbukti ketika Sultan yang pertama (Zainal Abidin) wafat, maka sebagai gantinya adalah putranya yang bernama Sirullah.

Pada masa pemerintahan raja-raja Ternate telah beberapa kali terjadi perjanjian diantaranya adalah perjanjian dengan gubernur De Mesquita, seorang kristen yang dilakukan oleh Sultan Khairun. Beliau diundang dalam acara jamuan besar di Benteng Portugis untuk menghormati perjanjian yang telah mereka lakukan, akan tetapi diluar dugaan terjadi peristiwa yang sangat mengejutkan, karena Sultan Khairun ditikam oleh seorang

⁴M. Yahya Harun, *Sejarah Islam Indonesia*, hal. 22-23.

pengawal pribadi De Mesquita dan akhirnya pada saat itu juga sultan meninggal. Dengan peristiwa tersebut, Babullah sebagai putranya menjadi marah dan seluruh daerah Ternate menjadi goncang baru kemudian pejabat atau orang-orang besar melantik Babullah menjadi sultan sebagai pengganti ayahnya. Dalam pelantikan itu rakyat diundang untuk menyaksikan dan bersorak sorai menyatakan kesetiaannya karena perhatian raja pada rakyatnya yang betul-betul terlihat dalam mensejahterakan mereka.⁵

Pada masa sebelum Islam datang, masyarakat Ternate menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, menganggap nenek moyang mereka adalah yang paling keramat. Tetapi setelah Islam datang keadaan menjadi berubah yang mana diawali masuknya raja mereka memeluk Islam dan diikuti oleh rakyatnya.

Sebagai kerajaan Islam, Kerajaan Ternate memiliki masjid sebagai tempat peribadatan, disamping itu juga dimanfaatkan sebagai tempat musyawarah untuk memecahkan masalah-masalah yang menyelimuti kerajaan. Demikian pula dengan para ulamanya juga tidak ketinggalan untuk menyumbangkan tenaganya guna membina rakyat, memberikan pengetahuan serta wejangan-wejangan kepada para pejuang untuk mengusir penjajah dari tanah air mereka.

Tercatat dalam sejarah, bahwa dalam pusat kerajaan Ternate terdapat beberapa masjid dengan bangunan yang megah dan unik yang membedakan dengan bangunan masjid-masjid yang ada di daerah lain.

C. Hubungan Ulama dengan Rakyat

Minat beragama rakyat Ternate terhadap Islam sangat tinggi dan antusias untuk mempelajari ajaran-ajarannya. Hubungan ulama dengan rakyat nampak harmonis. Diceritakan bahwa pada suatu ketika datanglah seorang ulama dari daerah Melayu yang bernama Datuk Maulana Husen, dimana pada suatu hari beliau membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, maka terdengarlah oleh mereka (orang Ternate), kemudian mereka tertarik dan memintanya supaya diajari. Datuk segera menerima permintaan itu tetapi dengan syarat bagi mereka yang belum masuk Islam agar masuk agama Islam lebih dulu.⁶

⁵*Ibid.*, hal. 227-228.

⁶*Ibid.*, hal. 216-217.

Disamping menggunakan cara biasa, dalam mengajarkan Islam para ulama juga menggunakan kebudayaan dengan warna Islam.

¹ Al-Yaqub, Harun, *Sejarah Islam* (Jember: IAIN Jember, 2012), hal. 22-23.

² Ibid., hal. 22-23.
³ Ibid., hal. 22-23.

VI KERAJAAN TIDORE

A. Asal-usul Kerajaan Tidore

Islam masuk ke daerah Maluku secara resmi pada abad ke-15. Kerajaan Tidore merupakan salah satu dari kerajaan di Maluku, yaitu : Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Sebelum masuknya Islam ke Tidore, raja-raja Tidore secara turun temurun menganut aliran animisme atau dikenal dengan agama Symman: “pemujaan terhadap roh-roh leluhur nenek moyang mereka.”¹

Pengaruh Islam masuk ke daerah Maluku menurut catatan sejarah, adalah melalui para saudagar Arab Persia yang pada mulanya hendak mencari rempah-rempah di maluku untuk diperniagakan ke Eropa. Kesempatan baik ini dimanfaatkan oleh orang-orang Arab Persia untuk mengambil yang sebesar-besarnya disamping mereka dapat menyebarkan agama Islam di Maluku, melalui Islamisasi keluarga raja. Berkat usaha dari para saudagar Arab itulah raja Tidore pertama Kalano Ciriati akhirnya memeluk agama Islam beserta putranya baginda yang sulung yang kemudian baginda berganti nama menjadi Sultan Jamaluddin, sedangkan putra baginda bernama Mansur diambil dari Syekh Arab yang mengislamkannya yang bernama Syekh mansyur.² Akan tetapi ada pola

¹Hamka, *Op. cit.*, hal. 214.

²*Ibid*

sebagian sejarawan yang menyebutkan bahwa raja-raja Maluku, Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo itu berasal dari keturunan Ja'far Sidiq, cucu Ali bin Abi Thalib, karena perkawinannya dengan bidadari raja.

B. Aktifitas Islamisasi Raja

Dalam kerajaan Tidore, setelah Sultan Jamaluddin memeluk agama Islam, keluarga besar raja beserta rakyatnya pun secara berangsur-angsur memeluk agama Islam.

Pada intern kerajaan Tidore mendapatkan kendala yang besar dalam rangka Islamisasi rakyatnya. Karena disamping sultan Jalaluddin sebagai raja telah menjadi figur untuk diikuti rakyatnya, para Syekh dan Datuk yang berasal dari Arab Persia itu terus menerus menyebarkan Islam di kalangan rakyat Tidore melalui pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an atau pendekatan-pendekatan rohani dengan menjelaskan hakikat Islam di kalangan mereka sehingga banyak yang tertarik untuk memeluk Islam. Dalam hal ini, aktifitas intern kerajaan di Maluku lebih difokuskan untuk membangun madrasah-madrasah dan masjid-masjid sebagai sarana penampungan pendidikan dan ibadah rakyat.

Aktifitas Sultan untuk menegakkan syiar Islam ini mendapat tantangan yang keras dari (Misionaris) Katolik serta bangsa Portugis dan Spanyol untuk merebut Tidore di Bawah kekuasaannya. Usaha Portugis untuk merebut Tidore ini direalisasikan melalui gerakan-gerakan pendeta penyiur Katolik untuk menyebar-luaskan pengaruhnya serta lewat perjanjian dominasi monopoli penjualan cengkeh oleh Portugis, sehingga ruang lingkup raja Tidore semakin tertutup untuk menggerakkan kekuasaannya. Sikap semacam ini akhirnya menimbulkan permusuhan terhadap Islam dan penghinaannya terhadap Sultan Tidore tidak tertahankan lagi sehingga terjadi peperangan yang berkepanjangan. Sikap kasar Portugis terhadap Islam, penghinaan janji-janji terhadap Islam serta mengkhawatirkan orang Islam dan membakar kota Tidore, membuat raja Tidore gigih berjuang melawan Portugis dan mempertahankan Islam untuk tetap eksis di daerah itu. Aktifitas dalam rangka mempertahankan Islam inilah yang secara teguh dipegang raja Tidore dalam menghadapi serangan-serangan Portugis.³

³*Ibid.*, hal. 223.

C. Kerajaan Islam Tidore dalam Perspektif Indonesia Timur

Kerajaan Islam Tidore termasuk kerajaan yang mempunyai pengaruh besar, di samping kerajaan Ternate, baik dalam penyebaran Islam di daerah Maluku maupun dalam mempertahankan kerajaannya dari pengaruh Spanyol dan Portugis yang silih berganti hendak merebut dan menghancurkan Tidore dengan jalan diplomasi politik monopoli rempah-rempah atau dengan melangsungkan hubungan baik di awal kedatangannya, atau bahkan otoritas para gubernur Portugis untuk menyatukan Tidore.⁴

Tidore termasuk kerajaan kedua yang menganut ajaran Islam di Maluku setelah Ternate. Catatan ini diambil dari perlawtan Pigafeta, orang Spanyol yang menuliskan bahwa pada saat dia ke Tidore tahun 1521, usia Sultan kurang lebih 55 tahun dan Islam telah masuk ke daerah itu 50 tahun sebelumnya, saat Sultan berusia 5 tahun. Sementara keterangan orang Portugis yang datang ke Ternate dalam tahun 1521 menyebutkan bahwa pada saat itu Islam telah masuk Ternate lebih dari 80 tahun yang lalu. Dari dua keterangan inilah bisa dikonfirmasi adanya selisih waktu yang cukup lama masuknya Islam ke Ternate dan Tidore.

Namun demikian, pada masa-masa berikutnya Tidore hampir dapat dipararelkan dengan kerajaan Islam Ternate, karena pada masa perkembangan Islam di dua kerajaan tersebut mendapat perhatian besar dari bangsa Portugis dan Spanyol, di samping sebagai kerajaan Islam yang besar di daerah Maluku. Kekuatan Tidore dalam menyebarkan Islam di Maluku, sumbangsih-raja-raja Tidore dalam membangun sarana-sarana keagamaan menyebabkan Islam kuat di Tidore selakigus menyebabkan kecemburuan dan keinginan Spanyol dan Portugis untuk menghancurkannya. Dengan berbagai cara Portugis dan Spanyol mengadu domba Ternate dan Tidore, bentuk kolusi Portugis terhadapn raja Ternate untuk mendukung posisi kerajaannya.

Spanyol yang membela Tidore ketika bersaing dengan Ternate, akhirnya menjadikan dua kerajaan Islam ini sering berselisih paham dan saling berebut kekuasaan.

D. Peran Ulama

Walaupun sejarah mencatat bahwa besarnya pengaruh saudagar Arab Persia dalam menyebarkan Islam, hal ini tidak memberikan indikasi

⁴*Ibid.*, hal. 221.

tidak adanya pengaruh dan peran ulama terhadap pertumbuhan dan perkembangan Islam di Tidore. Posisi ulama bisa dipandang lebih besar pengaruhnya dibanding para saudagar Arab Persia. Karena para saudagar lebih banyak memasukkan pengaruh agama Islam pada golongan elite kerajaan. Sedangkan para ulama menyebarkan di kalangan masyarakat awam melalui berbagai pendekatan terhadap rakyat (approach to Society), kadang dengan melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan suara yang merdu sehingga banyak diantara mereka yang tertarik dan ingin membacanya, dan akhirnya ia masuk Islam.

Disamping itu para ulama banyak memberikan penjelasan-penjelasan tentang hakikat Islam yang merupakan cara lain dari pendekatan yang sama.

Jika para raja Maluku di Ternate dan Tidore banyak membangun sarana ibadah dan sarana keagamaan lainnya, seperti masjid, madrasah dan sebagainya, maka ulama berperan sebagai praktisi yang mengisi masjid-masjid dan madrasah-madrasah itu dalam rangka menyebarkan dan memperkokoh agama Islam di daerah Maluku.

Pembangunan sarana keagamaan oleh para raja dijadikan kesempatan emas oleh para ulama untuk mendidik rakyat Maluku, memasukkan pengaruh Islam lebih intensif dan memperkokoh keimanan rakyat. Dengan penggemblengan yang dilakukan oleh para ulama, kekuatan propaganda Kristen yang dilakukan oleh Portugis dan Spanyol gagal. Hal ini menimbulkan pemaksaan dari misionaris-misionaris Kristen untuk menghancurkan Tidore, maka berlangsunglah peperangan yang berkepanjangan.

Dalam usaha mempertahankan aqidah rakyat dari pengaruh misionaris, maka para ulama dengan segenap kemampuannya melakukan pembinaan-pembinaan keimanan dan amaliah. Acap kali umat Islam Ternate dan Tidore melakukan perlawanan dalam mempertahankan ajaran Islam.

E. Hubungan Tidore dengan Asing

1. Spanyol dan Portugis

Raja Spanyol yang mengirim armadanya ke Indonesia dengan tujuan Maluku pada tanggal 8 November 1521 memasuki Tidore. Mereka diterima dengan ramah, sehingga keduanya menjalin persahabatan. Pada saat yang hampir sama, yaitu tahun 1522, Ternate juga menjalin

persahabatan dengan Portugis.

Permusuhan antara Tidore dan Portugis berawal sejak Antonio De Brito mendengar kedatangan Junjung dari Banda yang ingin membeli cengkeh sehingga ia mengirim sebuah galai untuk melawannya. Tetapi galai sendiri tenggelam di dekat Tidore. Orang Tidore kemudian memenggal 16-17 kepala orang Portugis. Maka timbullah permusuhan antara Tidore dengan bangsa Portugis. Kerajaan Tidore mendapat dukungan dari Spanyol sedangkan Portugis dibantu Ternate, orang Portugis dapat mempertahankan kedudukannya di Ternate untuk beberapa waktu.⁵

Pada tahun 1529 Dom Jorge de Meneses dari Portugis dengan sekutu Ternate dan Bacan menyerbu Tidore serta berhasil mengalahkan Tidore dan orang Kastilia, Spanyol.

Tahun 1533 Tristoa de Taida karena tindakannya yang kasar menimbulkan pemberontakan rakyat Ternate dan sekutunya. Di pihak lain Tidore dan Bacan juga melakukan hal yang sama, sehingga seluruh Maluku dapat dikatakan bangun melawan Portugis. Mereka berjanji bila tidak berhasil mengusir Portugis, mereka akan menebang pohon cengkeh dan merusak negerinya. Maka pada tanggal 27 Oktober 1556 Galfao (Portugis Malaka) datang memberi bantuan kepada Portugis yang ada di Maluku. Galfao hendak melakukan perdamaian dengan Tidore tetapi gagal sehingga terjadi pertempuran. Pada waktu itu raja Dajalo Ternate mengadakan perlawanan pada Portugis, tetapi dapat dikalahkan. Dan Galfao juga berhasil masuk benteng Tidore. Maluku dikuasai Portugis, rakyatpun tertindas dan terperas.⁶

2. Belanda

Sekitar tahun 1582 orang-orang Spanyol mencoba merebut Ternate, akan tetapi usaha ini tidak berhasil. Karena tidak lama kemudian orang-orang Belanda muncul di perairan Maluku, dimana Steven Van Derheghen merebut benteng Portugis di Amboina (23 Pebruari 1605). Corenelis Bastian (Belanda) merebut benteng Tidore dan akhirnya dengan mudah dikuasai armada Spanyol (1606) dibawah pimpinan Accuna.⁷

Tahun 1607 Belanda kembali mendapat bantuan Ternate yang

⁵Marwati Djoened Poesponegoro, dkk., *Sejarah Nasional Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 43.

⁶*Ibid.*, hal. 44.

⁷*Ibid.*, hal. 62.

membenci Spanyol. Dengan bantuan itu Belanda menduduki Ternate dan mendirikan benteng-benteng mereka dan menyerang Spanyol di Tidore dan berhasil merebut Makian dan Motir. Diantara orang-orang Spanyol dan Belanda di Maluku sering terjadi pertempuran sekitar 1624-1639, di mana Spanyol mengalami kekalahan. Tahun 1639 Ternate dan Tidore membuat persetujuan. Dalam perebutan perdagangan rempah-rempah VOC tidak hanya bersaing dengan pedagang Barat, tetapi juga dengan kerajaan-kerajaan di Jawa dan Melayu. Para pedagang yang dianggap sebagai penyelundup oleh Kompeni didukung oleh Sultan Ternate dengan tujuan meluaskan pengaruhnya dalam menghadapi Belanda. Tahun 1635 timbullah perlawanan di mana-mana yang dipimpin oleh Kakiali Kapten Hitu. Gubernur Jenderal Van Diemen dua kali menuju Maluku 1637-1638 untuk menegakkan kekuasaannya. Setelah Kakiali berhasil ditumpas, perjuangan orang-orang Hitu dipimpin oleh Teluka Besi dan perlawanan ini baru tuntas tahun 1646.⁸

Akibatnya pemimpin Gitu banyak diasingkan ke Batavia untuk mudah diawasi Kompeni. Sejak beberapa tahun perlawanan rakyat Maluku terhadap Kompeni dapat dikatakan reda, akan tetapi sejak tahun 1650 timbulah perlawanan yang meluas dari daerah Anuboma sampai Ternate. Pemimpin perlawanan adalah Saidi, yang sangat mencemaskan Belanda. Seluruh rempah-rempah dibakarnya. Tidak lama kemudian Saidi ditangkap dan ditusuk belati oleh De Umaligh Van Oosthoorn. Dengan demikian perlawanan rakyat Maluku dapat ditumpas.⁹ VOC telah berhasil menanamkan kekuasaan politik kolonialnya di daerah Maluku. Meskipun demikian pada abad berikutnya politik kolonial Belanda selalu mendapat perlawanan dari sultan-sultan dan rakyat.

⁸*Ibid.*, hal. 63.

⁹*Ibid.*, hal. 64.

VII

KERAJAAN MAKASAR

A. Masa Timbulnya

Kerajaan Makasar terdiri atas dua kerajaan, yaitu Goa dan Tallo. kedua kerajaan itu saling mengadakan hubungan baik, sehingga orang luar hanya mengenal sebagai kerajaan Makasar saja. nama Makasar diambil dari Ibu kota Goa dan sekarang berganti nama menjadi Ujung Pandang. Makasar terletak di pantai barat semenanjung Sulawesi Selatan, sedangkan di pantainya terdapat kerajaan lain yaitu kerajaan Bugis, Laut Flores di sebelah selatan, dan teluk Bone di sebelah Timur. Keadaan alam yang demikian menyebabkan kedua suku bangsa, yaitu Makasar dan Bugis menjadi ulung.¹ Tetapi Bugis lebih luas daerahnya. Berpusat di Luwu, Bone (termasuk Sappeng), Wajo dan Sidenreng.²

Menurut catatan kerajaan Goa dan Bone, agama Islam masuk dengan resmi ke negeri itu sekitar tahun 1602 atau 1603, karena Raja Goa Karaeng Tonigallo telah menerimanya dari tiga orang guru agama Islam yang datang dari Minangkabau, yaitu Datuk ri Bandang, Datuk ri Tiro dan

¹Supartono Widyosiswoyo, *Sejarah Nasional Indonesia dan Sejarah Dunia*, PT Intan Parivara, 1992, hal. 217.

²Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hal. 209.

Datuk Patimang. Tetapi sebelum raja memeluk Islam, sudah ada orang Islam sebagai pedagang di Goa jauh sebelum itu. Ketika suatu utusan Portugis datang ke Goa pada tahun 1540, mereka telah mendapati beberapa orang Islam berdiam di Goa, tetapi mereka datang dari daerah lain. Dapatlah laporan orang Portugis itu diterima, jika mengingat setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 banyak pedagang Islam melarikan nasibnya ke daerah lain, diantaranya ke Makasar.³

Rupanya setelah Goa menerima Islam, dengan bersemangat mereka mengajak raja-raja tetangganya, yang menurut kepercayaan orang di sana, keempat raja di daerah itu berasal dari satu keturunan, yaitu dari Sawirgading. Maka Makasar mengajaklah kepada daerah raja-raja yang tiga lagi itu supaya masuk Islam. Setelah mereka menolak merekapun diperangi, sehingga beberapa daerah terutama Suppeng merasa bahwa mereka ditaklukkan oleh Goa dengan kekerasan memakai nama Islam.⁴

Faktor-faktor yang menyebabkan Kerajaan Makasar berkembang menjadi kerajaan dan pusat perdagangan Indonesia Timur adalah :

1. Makasar memiliki syarat-syarat yang baik untuk menjadi pelabuhan, terletak di muara sungai dan di depannya terdapat gugusan pulau yang dapat melindungi pelabuhan dari angin maupun gelombang besar.
2. Letaknya strategis untuk perdagangan, yaitu di tengah-tengah jalan dagang nasional dan dalam zaman Indonesia Hindu, selat Makasar sudah merupakan jalan dagang internasional.
3. Jatuhnya Malaka ke tangan bangsa Portugis (1511) menyebabkan banyak orang pindah tempat dagangnya di daerah-daerah yang belum dikuasai oleh bangsa asing.
4. Politik Sultan Agung yang sifatnya agraris dan non maritim banyak melemahkan armada laut di pantai utara Jawa.

Akibat politik agraris, perdaganganpun menjadi lemah, sehingga pedagang-pedagang banyak yang pindah ke daerah lain seperti Makasar.

Kerajaan Makasar berkembang cepat sebagai negara maritim. Dengan perahu-perahu layarnya jenis Penisis dan Lambo suku Makasar maupun Bugis merajai lautan di Indonesia, malahan sampai di Sailan, Siam dan Australia. Di Indonesia sendiri banyak terdapat perkampungan kedua suku pelaut pedagang itu yang biasanya disebut kampung Bugis.⁵

³*Ibid.*, hal. 218.

⁴*Op. cit.*, hal. 218.

⁵*Ibid.*, hal. 219.

B. Masa Kejayaannya

Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Said dibantu Karaeng Pattingaloang inilah kerajaan Makasar berkembang pesat (1639-1653) dan mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin (1653-1669). Pada masa itu wilayah kekuasaannya luas sekali dan besar pengaruhnya terutama di wilayah Indonesia bagian Timur. Panji-panji kerajaan Goa disegani dan dihormati oleh kawan maupun lawan. Supremasi kerajaan Makasar di wilayah Indonesia bagian Timur diakui dan dihormati. Sultan Muhammad Said termasyhur sampai dimana-mana, sampai ke beberapa negeri di Asia, bahkan sampai Eropa. Hal ini juga terutama disebabkan karena jasa-jasa Karaeng Pattingaloang pandai menjalankan diplomasi.⁶

Makasar berkembang menjadi pelabuhan internasional. Hal ini ditandai kedatangan pedagang asing seperti Portugis, Inggris, dan Denmark untuk berdagang di Makasar. Dengan jenis perahu-perahunya seperti Pinisi dan Lambo, pedagang pelaut Makasar memegang peranan penting dalam perdagangan Indonesia. kepentingan ini menyebabkan mereka berhadapan dan menimbulkan beberapa kali pertempuran dengan Belanda. Belanda yang merasa berkuasa atas daerah Maluku sebagai sumber rempah-rempah, menganggap Makasar sebagai pelabuhan gelap karena di situ dijual belikan rempah-rempah dari Maluku. Baik di Maluku sendiri maupun di Makasar digelari ayam-ayam jantan dari timur oleh Belanda. Untuk mengatur pelayaran dan perniagaan dalam wilayahnya, disusunlah hukum niaga dan perniagaan yang disebut Ade Allopoloping Bicaranna Pabbulu'e dan sebuah naskah lontar karya Amanna Gappa.⁷

C. Masa kemundurannya

Betapapun kemajuan Makasar sesudah Islam, adat istiadatnya tidak boleh dilupakan. Raja-raja di ketiga daerah yang lain termasuk Wajo dan Soppeng bukanlah jajahan Makasar, tetapi raja Empat Sela, yang duduk sama rendah tegak sama tinggi, masing-masing dengan gelar kebesarannya; Pajung, Makau, Sombaya dan Adatuang.

Makasar kurang memperhatikan hal tersebut. Sehingga sifatnya terlalu keras negeri-negeri itu, terutama Soppeng yang dalam adat bersatu

⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Benteng Ujung Pandang*, hal. 95.

⁷Supartono, *Op. cit.*, hal. 219.

dengan Bone. Perasaan tidak puas kian lama kian mendalam, dipimpin oleh seorang anak raja yang masih muda dari Soppeng bernama Aru Palaka. Kompeni akhirnya mengetahui dendam yang sangat mendalam tersebut.

Berkali-kali Kompeni hendak mencoba meruntuhkan kerajaan Makasar dengan blokade, tetapi tidak berhasil. Akhirnya blokade tersebut ditinggalkan, lalu dibuatlah suatu perjanjian. Dalam perjanjian itu Belanda mengakui hak Makasar untuk berlayar ke mana-mana, bebas. Kecuali dua tempat saja yang tidak boleh, yaitu Malaka dan Seram.

Sudah barang tentu Sultan Hasanuddin sangat tidak setuju, dengan tantangan dengan kehendak Allah. Allah yang mengadakan dunia supaya sekalian manusia sama berbahagia, Ataupun tuan menyangka bahwa Allah mengecualikan pulau-pulau yang jauh dari tempat bangsa tuan itu hanya untuk perdagangan tuan?"⁸

Sultan Hasanuddin masih mencoba menyusun tentaranya yang kocar-kacir sekali. Tetapi menyusun yang kucar-kacir tidaklah sama dengan kekuatan semula. Maka akhirnya pada tahun 1667 mengaku tunduklah Sultan Hasanuddin dan dibuatlah "Perjanjian di Bongaya" yang terkenal. Dalam perjanjian itu menyatakan kekalahan Makasar.⁹

D. Sistem Politiknya

Sultan Hasanuddin adalah sosok religius,¹⁰ dalam menghadapi bangsa asing yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah, sangatlah non-cooperatif. Karena tindakan mereka yang serakah sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan Yang Maha Pemurah. Dalam hal ini adalah Belanda, yang ingin menguasai perdagangan di Makasar.

Walaupun telah diblokade, tetapi tidak diacuhkannya. Beliau tidak ingin kehilangan sebagian daerahnya. Apalagi setelah diikat dengan perjanjian Bongaya¹¹ yang sangat merugikannya. Beliau dan seluruh rakyat sangat marah serta bertekad untuk dengan segala kemampuannya melawan Belanda, walaupun akhirnya mereka kalah.

Sistem politik yang dilancarkan oleh Kerajaan Makasar adalah sistem terbuka. Politik dengan prinsip terbuka itu berdasarkan teori laut

⁸Hamka, *Op. cit.*, hal. 297.

⁹*Ibid.*, hal. 299.

¹⁰*Ibid.*, hal. 297.

¹¹*Ibid.*, hal. 286.

bebas. Teori ini dianut oleh raja-raja Makasar dan sesuai benar dengan status politik Goa Tallo, serta pelabuhan makasar pada saat itu. Sistem perdagangan terbuka ini dirasa lebih menguntungkan dari pada merugikan, lagi pula pedagang asing mendapat jaminan bagi usaha mereka sehingga perdagangan internasional tersebut dapat menghidupi dengan segala keuntungan dari padanya.¹²

Politik sentralisasinya cenderung diktator. Dalam memperlakukan kerajaan-kerajaan bawahannya, kurang menghormati dan cenderung menganggap sebagai daerah taklukan. Hal ini merupakan salah satu sebab runtuhnya kerajaan Makasar dari dalam.

E. Peran Ulama

Dalam sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, tidak banyak disebutkan tentang peranan ulama-ulama terkemuka di Makasar.¹³ Mungkin ini banyak disebabkan oleh pengaruh-pengaruh agama primitif nenek moyang, juga berakar kuatnya dogma-dogma Hindu dalam diri dan kehidupan sosial masyarakat Makasar sebelum datangnya Islam. Disamping itu, ekspansi keagamaan yang dilancarkan oleh misionaris-misionaris cukup membuat bingung penguasa Makasar untuk memilih mana yang pantas menjadi agama resmi kerajaan.

Para Ulama di Madasar banyak yang berasal dari Sumatra, sebagai perutusan dari Kerajaan Indrapura (Atjeh). Merekalah yang memegang peranan penting dalam usaha mengislamkan penguasa dan menyebarkan ke masyarakat Makasar, yang pada gilirannya nanti akan ikut memberi semangat baru bagi rakyat Makasar untuk menentukan pegangan hidup mereka.

Salah seorang ulama asli Makasar yang sampai sekarang dibicarakan adalah Syeikh Yusuf. Beliau telah melawat dan menuntut ilmu ke negeri atas angin. Awalnya ke Aceh, Yaman, Hadhralmaut, dan terus menuju Mekkah, Madinah dan Syam (Damaskus). Selain menekuni ilmu Fiqih, beliau juga berkecimpung dan sangat minat terhadap ilmu tasawuf, sehingga mendapat gelar kehormatan tertinggi dalam formasi Tariqat Khalwatiyah dengan sebutan Syeikh Yusuf bin Abdullah, Abul Mahasin Hidayatullah Tajul Khalwaty.

¹²Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900*, Gramedia, Jakarta, 1992, hal. 21.

¹³Hamka. *Op. cit.*, hal.289.

Merurut catatan sejarah, para ulama di Makasar asli maupun pendatang tidak meninggalkan karya-karya monumental yang diwariskan kepada generasi mendatang.

Kemungkinan besar dalam hal ini dikarenakan mereka telah bersatu paham tentang aqidah dan syari'ah Islam tanpa harus berpolemik terlebih dulu. Selain itu dakwah langsung kepada masyarakat Makasar lebih mereka utamakan, dari pada lewat tulisan-tulisan.

VIII

KERAJAAN BANJAR

A. Asal-usul Kerajaan Banjar

Di Kalimantan nama Banjar mula-mula dipakai untuk membedakan orang Melayu dari orang Jawa yang berjasa terhadap Sultan Suriansyah, sesuai dengan arti Banjar itu sendiri, yaitu 'kelompok'.¹

Sedangkan Banjarmasin berasal dari kata Banjarmasih, yang mengalami perubahan. Perubahan ini ada dua kemungkinan. Pertama, karena lidah asing (Belanda) yang menyebutnya Banjarmassingh, lalu menjadi Banjarmasin. Kedua, pedagang-pedagang Jawa dengan layarnya pada musim kemarau, di saat sungai Barito dan Martapura airnya menjadi asin, maka disebutlah Banjarmasin.²

Dalam hikayat Banjar, sekitar abad XII berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Negara Dipa. Kerajaan ini dibangun oleh Empu Jatmika. Ia datang ke Pulau Hujung Tanah (Kalimantan) dengan rombongannya memakai kapal Prabajaksa, dalam rangka memenuhi wasiat almarhum ayahnya, Mangkubumi. Sepeninggal ayahnya Empu Jatmika disuruh meninggalkan Negeri Keling,³ dan mencari tempat tinggal baru yang

¹Hasan Yusuf, *Gelora Kalimantan Selatan dalam Madya Abad XII'* (Yogyakarta : Persatuan, 1982), hal. 20.

²Idwar Saleh, *Banjarmasih* (Jakarta : Departemen P & K 1982), hal. 17.

³Bukan Kalingga yang ada di India, tetepi Keling yang ada di Kediri Jawa Timur.

tanahnya panas dan berbau harum.⁴ Maka sampailah ia di suatu tempat yang bernama Pulau Hujung Tanah. Di daerah inilah ia kemudian menemukan tanah yang panas dan berbau harum seperti yang diwasiatkan oleh ayahnya, maka kemudian ia membuat Candi Agung dan Empu Jatmika menyebut dirinya Maharaja di Candi.⁵

Sebagai tokoh pimpinan yang kemudian diakui pula oleh penduduk di daerah tersebut, maka ia memerintahkan Tumenggung Tatah Jiwa dan Arya Megatsari menaklukan orang-orang Batang Tabalong, Batang Balangan, Batang Petap, Batang Alai dan Amandit serta Labuhan Amas dan orang-orang Bukit.⁶ Dengan penaklukan ini, maka Negara Dipa semakin kuat dan wilayahnya bertambah luas. Sari Kaburungan sebagai raja ketiga dalam kerajaan Nagara Dipa memindahkan pusat kerajaannya ke sebelah selatan. Pusat kerajaan yang baru ini dikenal dengan kerajaan Negara Daha. Pada saat itu pula bandar Daha dipindahkan ke Muara Rampiu, kemudian ke Muara Bahan dan terakhir pindah ke Banjarmasin. Akhirnya Banjarmasin berfungsi sebagai bandar baru.

Setelah Sari Kaburungan meninggal, digantikan anaknya Maharaja Sukarama, yang mempunyai tiga orang anak, yaitu : Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumenggung dan Putri Galuh. Perebutan kekuasaan pun terjadi. Pangeran Mangkubumi - yang menggantikan Sukarama - dibunuh oleh Pangeran Tumenggung. Sebelumnya Sukarama berwasiat kepada Patih Aria Trenggana, apabila ia meninggal maka yang berhak menggantikannya adalah cucunya yang bernama Pangeran Samudra. Pada saat itu Pangeran Samudra menjadi musuh besar Pangeran Tumenggung, yang rakus akan kekuasaan. Patih Aria Trenggana yang mendapat wasiat dari Sukarama menasihatkan agar Pangeran Samudra meninggalkan istana. Ia menurut untuk meninggalkan istana dan menyamar sebagai nelayan di daerah Serapat, Belandian, Kuin, Balitung dan Banjar. Patih masih penguasa bandar daerah dimana Pangeran Samudra menyamar sebagai nelayan, menemukannya, maka akhirnya setelah berunding dengan Patih Balit, Patih Balitung dan Patih Kuin bersepakat mengangkat Pangeran Samudra menjadi raja, karena mereka tidak ingin lagi daerahnya menjadi kampung yang terus menerus mengantar upeti ke Daha kepada Pangeran Tumenggung.⁷

⁴Ras J.J., *Hikayat Banjar: A Study in Malay Histography* (Leiden : Glossary, 1968), hal. 230.

⁵*Ibid.*, hal. 222.

⁶*Ibid.*, hal. 240.

⁷Idwar, Banjarmasin, *Op. cit.*, hal. 22

Pangeran Tumenggung yang mengetahui hal itu tidak tinggal diam, maka tentara dan armada turun ke sungai Barito dan di Hujung Pulau Allak, terjadilah pertempuran antara kedua belah pihak tanpa ada yang kalah dan yang menang.⁸

Peristiwa perang ini terjadi sekitar tahun 1526 M dan Pangeran Tumenggung dipukul mundur oleh pasukan Pangeran Samudra atas bantuan kerajaan Islam Demak, maka setelah perang selesai Pangeran Samudra dan tentaranya masuk Islam, yang jumlahnya sekitar 40.000 termasuk orang Banjarmasin.⁹ Maka sejak saat itu Sultan Samudra dinobatkan sebagai Sultan Banjar pertama yang berkedudukan di ibukota Banjarmasin (Banjarmasin) yang sejak beliaulah Islam berkembang secara resmi dan menjadi agama kerajaan di daerah ini.

Masuknya Islam di Kalimantan Selatan sebenarnya sudah ada sebelum Sultan Suriansyah memerintah. Hal ini berdasarkan cerita bahwa Sunan Giri pernah berlayar ke Pulau Kalimantan dengan membawa barang dagangannya. Sesampainya di pelabuhan Banjar, penduduk yang miskin diberinya barang dengan cuma-cuma. Hal ini jelas menunjukkan adanya hubungan dagang dengan Jawa dan Banjar, terutama Gresik, Tuban dan Ampel.¹⁰

Sultan Rahmatullah bin Sultan Suriansyah adalah Sultan Banjarmasin kedua yang berkedudukan di Banjarmasin kemudian memindahkan ibukota kerajaan ke Martapura. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1612 M. Sebelum Sultan Tahlillah (1700-1745 M) berkuasa, tidak ada peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Kerajaan Banjar. Baru setelah Sultan Tahlillah berkuasa berkali-kali kerajaan Banjar mengalami ketegangan politik yang disebabkan adanya perebutan kekuasaan dalam kerajaan. Sultan Tamjidillah I (1745-1778 M) merebut kekuasaan dari kemenakannya yang belum dewasa yaitu Sultan Kuning. Dalam tahun 1747 Tamjidillah membuat kontrak dengan V.O.C. yang menjadi dasar hubungan dagang antara Banjar dengan Batavia.¹¹

⁸*Ibid.*, hal. 23.

⁹*Ibid.*, hal. 430.

¹⁰Syaifuddi Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hal. 389

¹¹Idwar, *Op. cit.*, hal. 94.

B. Sistem Pemerintahannya

Kerajaan Banjar pada abad ke-17 M, ada hubungan dengan kerajaan Mataram di Jawa. Hubungan ini memberi pengaruh terhadap sistem pemerintahan kerajaan Banjar. Cence, sarjana Belanda mengatakan bahwa corak organisasi pemerintahan Banjar banyak dipengaruhi oleh Jawa, meskipun bukan dari Majapahit tapi mungkin dari Demak atau Mataram. Ia mengambil contoh organisasi kerajaan Kota Waringin yang merupakan bagian dari kerajaan Banjarmasin, yang jelas dipengaruhi oleh Jawa.¹²

Walaupun susunan organisasi pemerintahan dibangun menurut model Jawa, raja dalam kekuasaannya tidaklah semutlak (seabsolut) raja-raja Mataram. Dalam kerajaan, disamping keturunan, kekayaan juga merupakan faktor yang menentukan dalam kedudukan raja. Pada hakekatnya pemerintahan lebih bersifat aristokratis, yang dikuasai oleh kaum bangsawan, di mana raja ditengah-tengah golongan bangsawan dan para pedagang besar hanya merupakan pemersatu belaka.¹³

Sultan dalam struktur kerajaan Banjar adalah penguasa tertinggi, yang mempunyai kekuasaan dalam masalah politik dan persoalan-persoalan keagamaan. Dalam struktur kerajaan ini di bawah Sultan adalah Putera Mahkota yang dikenal dengan sebutan Sultan Muta. Ia tidak mempunyai jabatan tertentu tetapi pembantu Sultan. Disamping Sultan, terdapat sebuah lembaga Dewan Mahkota yang terdiri dari kaum bangsawan dan Mangkubumi.

Mangkubumi adalah pembantu Sultan yang mempunyai peranan besar dalam roda pemerintahan, jabatan Mangkubumi adalah jabatan yang biasanya dipegang oleh keluarga Sultan yang terdekat. Jabatan Mangkubumi tidak diadakan dengan cara turun temurun.

Mangkubumi di dalam pemerintahan didampingi Menteri *Panganan*, Menteri *Pangiwa* dan Menteri *Bumi* dan dibantu lagi oleh 40 orang Menteri Sikap. Tiap-tiap menteri Sikap mempunyai bawahan sebanyak 100 orang.¹⁴ Menteri *Panganan* dan Menteri *Pangiwa* bertugas mengurus perbendaharaan istana dan administrasi kerajaan termasuk pula Syahbandar yang bertugas mengatur perdagangan dengan dunia luar,

¹² *Ibid.*, hal. 50.

¹³ Bandingkan M. Masyhur Amin, "Kedudukan Kelompok Elit Aceh Dalam Persepektif Sejarah", dalam Alfian (ed.), *Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan* (Jakarta : Grafika, 1988), hal. 15.

¹⁴ Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluh Sejarah Kalimantan* (Banjarmasin : MAI Fajar, 1953), hal. 149.

Syahbandar mempunyai peranan penting dalam kerajaan mengingat pelabuhan di Kalimantan Selatan merupakan tempat persinggahan dari berbagai negara.

Dalam kerajaan Banjar sebelum abad ke-18 M pemimpin agama tidak termasuk dalam struktur kerajaan. Hukum Islam sebelumnya tidak diberlakukan dalam kerajaan. Hukum yang berlaku saat itu terhimpun dalam sebuah buku undang-undang hukum yang disebut *Kutara*, yang disusun oleh Arya Trenggana ketika dia menjabat Mangkubumi kerajaan. Mangkubumi mempunyai wewenang dalam keputusan terakhir terhadap seseorang yang dijatuhi hukuman mati.¹⁵

Elite birokrasi di luar istana terdiri dari Adipati (Gubernur) untuk tingkat propinsi yang membawahi daerah-daerah yang setingkat dengan distrik (Kabupaten). *Lawangan* membawahi yang setingkat dengan onderdistrik (kecamatan) yang dikepalai oleh Lurah, sedangkan Lurah membawahi desa yang dikepalai oleh Pembakal (kepala desa).¹⁶

Untuk melengkapi tata laksana di dalam keraton, maka dibentuk badan-badan khusus seperti Pasukan Sarawisa. Kelompok ini terdiri dari 50 orang, mereka bertugas melaksanakan pengawasan atas keamanan keraton. Kepala pimpinan Sarawisa ini disebut Surabaja.¹⁷

Tugas mengurus dan membersihkan (Bailarung) diserahkan kepada para petugas Mandung yang beranggotakan 50 orang yang dikepalai oleh pejabat Raksayuda. Pada saat para pembesar kerajaan menghadap raja, raja dikawal oleh pasukan pengawal yang beranggotakan 40 orang yang disebut kelompok Mamagasari. Petugas yang disertai untuk memelihara dan merawat senjata adalah kelompok Saragani. Kelompok Saragani ini dikepalai oleh Saradipa.¹⁸

Kelompok Pariwara atau Singabana bertugas mengawasi dan menjaga keamanan pasar, kelompok ini dikepalai oleh Singantaka dan Singapati. Mereka beranggotakan 40 orang yang bertugas mengurus pasar dan dinas kepolisian. Segala yang terjadi di pasar berada dalam pengawasan mereka. Uang denda menjadi penghasilan mereka.¹⁹

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa dalam struktur kerajaan, raja

¹⁵Gazali Usman, *Sistim Politik dan Pemerintahan Dalam Perjalanan Sejarah Masyarakat Banjar*. "Seminar Nilai Budaya Masyarakat Banjar, 1985", hal. 16.

¹⁶*Ibid.*, hal. 24.

¹⁷Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional Indonesia* (Jakarta : P & K, 1975), hal. 25.

¹⁸*Ibid.*, hal. 26.

¹⁹Idwar Saleh, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan* (Jakarta : Depdikbud, 1977), hal. 19.

menduduki posisi sentral, namun dalam pelaksanaannya raja dibatasi oleh Dewan Mahkota yang beranggotakan bangsawan, keluarga dekat raja dan pejabat birokrasi tingkat atas seperti Mangkubumi. Dewan Mahkota berfungsi sebagai penasehat raja dalam memecahkan persoalan-persoalan penting seperti soal pemerintahan, penggantian tahta, pengumuman perang dan damai, hubungan dengan kekuasaan negara lain dan sebagainya. Pengaruh Dewan Mahkota yang beranggotakan golongan bangsawan ini terhadap sikap dan tindakan raja sangat besar. Pengaruh ini sering disalahgunakan mereka untuk melemahkan kedudukan raja.

C. Sistem Sosial-Ekonominya

Perkembangan perekonomian di Kalimantan Selatan mengalami kemajuan yang pesat sejak akhir abad ke-16 sampai abad ke-17 Masehi. Banjarmasin menjadi kota dagang yang sangat berarti untuk mencapai suatu kemakmuran kerajaan.

Kalimantan Selatan memiliki perairan yang strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Perdagangan di Banjarmasin pada permulaan abad ke-17 M dimonopoli golongan Tionghoa. Kuatnya penarikan lada dari mereka untuk perdagangan ke Tiongkok mengakibatkan penanaman lada di Banjarmasin menjadi pesat sekali. Perahu-perahu Tiongkok datang ke Banjarmasin membawa barang-barangnya berupa barang pecah belah dan pulang kembali membawa lada. Pada masa puncak kemakmurannya di permulaan abad ke-18 M, hasil rata-rata tiap tahunnya mencapai 12 buah perahu Tiongkok yang datang ke Banjarmasin.²⁰

Dalam masyarakat Banjar terdapat susunan dan peranan sosial yang berbentuk segi tiga piramid. Lapisan teratas, adalah golongan penguasa yang merupakan golongan minoritas. Golongan minoritas ini terdiri dari kaum bangsawan atau keluarga raja yang sebagian memangku jabatan birokrasi dan sebagian lainnya melakukan usaha pribadi, seperti pedagang atau pemilik usaha pendulangan intan dan emas, semuanya dikuasai famili kerajaan, keluarga dari raja yang dikenal sebagai golongan bangsawan.²¹

Selain itu, pemimpin-pemimpin agama Islam, juga merupakan golongan penguasa tingkat atas yang mengatur semua kegiatan para

²⁰Idwar, *Sejarah Banjarmasin*, *Op. cit.*, hal. 55.

²¹Leirissa, *Sejarah Sosial Daerah Kalimantan Selatan* (Jakarta: Depdikbud, 1984), hal. 21.

pedagang, rakyat umum dan para petani. Penempatan golongan pemimpin agama pada tempat teratas ini didasarkan pada, bahwa agama Islam merupakan agama resmi di kerajaan dan pemimpin agama Islam dalam struktur kerajaan adalah satu kesatuan.

Sedangkan golongan mayoritas dalam masyarakat adalah golongan terbawah yang terdiri dari petani, nelayan, pedagang dan lain sebagainya biasa disebut orang jaba.

Dalam susunan sosial ekonomi, Belanda termasuk dalam golongan kedua setelah golongan penguasa, the rulling class. Hal ini terjadi karena hubungan baik antara Sultan dengan Belanda dalam perdagangan. Yang berarti memberikan keleluasaan pada mereka untuk mengambil kekayaan yang ada. Belanda juga menguasai pertambangan seperti minyak bumi, batu bara dan lain-lain.

Dalam perdagangan, lada merupakan komoditi eksport terbesar dalam kerajaan Banjar. Perkembangan perdagangan ini menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan politik pemerintahan. Para penguasa sebagai the rulling class berusaha menguasai tanah yang lebih luas dalam bentuk tanah apanage, yaitu tanah yang hasilnya dipungut oleh keluarga raja, dan dijadikan wilayah penguasaan penanaman lada. Besarnya perdagangan lada menyebabkan melimpahnya kekayaan bagi golongan politikus dan pedagang, karena mereka memiliki kekuasaan penuh yang tidak dimiliki oleh rakyat awam.

Masalah pemilikan tanah di Banjarmasin bukanlah merupakan masalah, karena disana tanah sangat luas dan masih banyak yang belum dimanfaatkan. Tanah tersebut dapat dikerjakan oleh setiap penduduk kerajaan asal bersedia membayar pajak kepada Sultan atas dasar anggapan bahwa semua daerah dalam lingkungan kerajaan adalah milik Sultan. Tanah yang dibuka dan dikerjakan oleh perseorangan disebut tanah *wawaran* dan jika dibuka dan dikerjakan bersama-sama atau berkelompok disebut *handil*. Untuk rakyat biasa tanah *wawaran* maksimal 40 junjang atau borongan, sedang untuk kaum bangsawan dapat mencapai 200 junjungan atau borongan.²²

Dalam kerajaan Banjar, pajak merupakan penghasilan yang terbesar dan sangat penting untuk menjalankan roda pemerintahan. Jenis-jenis

²² Istilah borongan atau junjang adalah ukuran yang biasa dipakai dalam masyarakat Banjar, yaitu 10 depa persegi satu borongan atau junjang.

pajak yang dipungut dari rakyat, adalah pajak uang kepala, sewa tanah, pajak perahu, pajak penghasilan intan dan emas.

Para pemungut pajak langsung dikerjakan oleh petugas pajak yang dibantu oleh kepala kampung setempat. Apabila mereka tidak dapat melunasi, maka akan dikenakan denda dan atau wajib kerja, dan daerah-daerah tanah yang subur akan dikenakan pajak yang lebih tinggi. Masalah pembayaran pajak yang tinggi sering menimbulkan keresahan dalam masyarakat yang berpenghasilan rendah atau minim, terutama bagi kaum petani dan pedagang.

Perekonomian masyarakat Banjar terdiri atas : Pertanian, Nelayan dan Industri.

1. Pertanian

Pertanian di Kalimantan Selatan lain dengan pertanian di Jawa, dimana kerbau bajak memegang peranan penting karena daerahnya bersifat rawa-rawa yang mengalami pasang surut. Cara yang cocok untuk daerah rawa adalah dengan menggunakan *tajak* yaitu sejenis parang untuk membersihkan tanah, dan menanam padi tanpa merusak lapisan lumpur subur yang menutupi lapisan tanah, tanpa irigasi dan sifatnya sangat spekulatif. Pertanian pada umumnya dikerjakan secara perseorangan, keluarga atau secara kelompok. Perseorangan ini dimaksud adalah menjadi buruh tani, atau mengambil upah baik waktu menanam maupun pada waktu panen. Jadi di Kalimantan Selatan ada dua macam petani, yaitu petani pemilik tanah dan petani buru (tidak memiliki tanah).

2. Nelayan

Nelayan banyak dijumpai di daerah pantai dan daerah rawa, seperti di Danau Bangkam (Negara), Danau Bitin (Alabiu), Alalak Padang (Martapura) dan Batibati (Palaihari).

Mata pencaharian nelayan di daerah ini merupakan salah satu usaha yang terpenting atau pokok dalam kehidupan masyarakat, karena adanya pantai, rawa-rawa dan sungai yang lebar. Alat-alat yang digunakan adalah rengge, rempa, hampang, jala dan alat lain yang sejenis. Penangkapan ikan cara tradisional seperti ini dilakukan turun temurun, dan hasilnya pun cukup memuaskan. Ikan yang dikeringkan sebagian untuk diekspor ke luar daerah.

3. Industri

Industri besi dan logam di Kalimantan Selatan terdapat di daerah

Negara. Kemampuan dan keahlian mereka mencor logam seperti perunggu, yang dapat menghasilkan bermacam-macam barang untuk diekspor. Sejak abad ke-17 Masehi daerah Negara terkenal dengan pembuatan kapal samudra dan peralatan senjata lainnya seperti : golok, kapak, cangkul dan lain-lain. Selain itu keahlian membuat kendi tempat air merupakan salah satu bentuk kerajinan yang telah berkembang turun temurun sebagai usaha sambilan disamping bertani. Kendi-kendi ini bukan saja untuk memenuhi keperluan daerah setempat, melainkan juga dijual sampai ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.²³

Selain jenis-jenis kerajinan tersebut, dalam masyarakat Banjar secara tradisional dikenal pula dengan usaha-usaha pertukangan, seperti tukang gergaji papan dan balok, tukang sirap dan lain sebagainya sebagai usaha sambilan masyarakat.

D. Sistem Budaya dan Agamanya

Untuk melacak budaya dan agama yang ada dalam masyarakat Banjar langkah pertama yang harus diketahui adalah asal usul dari manusia Banjar itu sendiri. Manusia Banjar berasal dari tiga golongan, yaitu kelompok Banjar Muara yang didominasi oleh suku Ngaju; kelompok Banjar Batang Banyu yang didominasi suku Maanyan; dan yang terakhir ialah suku Bukit yang disebut kelompok Banjar Hulu.²⁴

Dalam setiap kurun sejarah, kebudayaan Banjar mengalami pergeseran dan perubahan-perubahan hingga coraknya berbeda dari zaman ke zaman. Ini adalah manifestasi (penjelmaan) dari cara berpikir sekelompok manusia di daerah ini dalam suatu kurun waktu tertentu.

Dalam rentetan peristiwa sejarah, kita dapatkan bahwa masyarakat Banjar dimulai dari percampuran antara kebudayaan Melayu dengan kebudayaan Bukit dan Maanyan sebagai inti, kemudian membentuk kerajaan Tanjung Pura dengan agama Budha. Yang kedua, percampuran kebudayaan antara kebudayaan pertama dengan kebudayaan Jawa dimana kebudayaan Maanyan, Bukit dan Melayu menjadi inti, yang kemudian membentuk kerajaan Negara Dipa dengan agama Budha. Yang ketiga adalah perpaduan dengan kebudayaan Jawa yang membentuk kerajaan

²³Idwar Saleh, *Adat Istiadat Daerah Kalimantan Selatan* (Jakarta : Depdikbud, 1977), hal. 40.

²⁴Idwar Saleh, *Pergeseran Budaya dalam Perjalanan Sejarah Masyarakat Banjar*, Hasil seminar sistim nilai budaya masyarakat Banjar dan Pembangunan, tanggal 28 - 30 Januari 1985, hal. 3.

Negara Daha dengan agama Hindu. Yang terakhir lanjutan dari kerajaan Negara Daha dalam membentuk kerajaan Banjar Islam dan perpaduan suku Ngaju, Maanyan dan Bukit. Dari perpaduan yang terakhir inilah akhirnya melahirkan kebudayaan yang ada dalam kerajaan Banjar.²⁵

Setelah agama Islam masuk, perubahan kebudayaan terjadi dengan hebatnya, sekalipun sedikit demi sedikit namun sangat terasa. Dengan perebutan kekuasaan Pangeran Samudra mengambil alih kekuasaan dan membangun kerajaan Banjar Islam sebagai dinasti baru. Agama Hindu runtuh dan digantikan dengan agama Islam sebagai agama baru masyarakat Banjar. Candi Agung dan Candi Laras dihancurkan. Raja-raja Hindu Banjar digantikan oleh raja-raja Banjar Islam dan rakyat tunduk bukan hanya dalam politik tetapi juga dalam bidang religius yang merupakan pegangan dan keyakinan mereka. Sekalipun timbulnya kerajaan Islam dengan jalan perebutan tahta oleh Pangeran Samudra, namun dalam kebudayaan terjadi pembauran dan percampuran dengan jalan damai.

Agama Islam merupakan agama mayoritas bagi masyarakat Banjar, dan mereka dikenal taat menjalankan perintah agama Islam. Banyak perilaku yang mereka jalannya berlandaskan pada ajaran Islam dan juga hal-hal yang bersifat sosial dan budaya. Sekalipun demikian unsur-unsur kepercayaan lama yang berurat berakar masih tampak dalam kehidupan masyarakat Banjar. Di dalam beberapa hal unsur-unsur kepercayaan tercampur atau dilakukan secara bersamaan dengan ajaran yang ada dalam agama Islam, yang sudah barang tentu tidak bertentangan dengan aqidah, yang kemudian dianggap sebagai tradisi.

Kebudayaan Banjar dapat kita lihat dalam sistem kepercayaan, sistem upacara dan sistem pengetahuan yang ada dalam masyarakat Banjar.

1. Sistem Kepercayaan

Dalam kepercayaan ini daerah Kalimantan Selatan sejumlah jenis benda dianggap memiliki kekuatan sakti yang memberi manfaat atau keburukan bagi si pemakai, umpamanya kekuatan sakti yang ada pada besi sebagai senjata, yang biasa disebut tuah besi. Ada besi yang membuat orang kebal dan disegani orang, ada juga besi yang dapat digunakan

²⁵*Ibid.*, hal. 6.

untuk berdagang, untuk pejabat dan lain sebagainya. Adapun bentuk besi ada yang berupa keris, tombak dan lain-lain.²⁶

Selain itu masyarakat Banjar mempercayai pula akan adanya kekuatan sakti dari batu, dalam hal ini ada dua jenis batu yang khas kedudukannya dalam hal pemilikan tenaga ghaib yaitu batu akik dan batu zambrut. Batu akik yang mengandung tenaga ghaib adalah yang mempunyai pancaran khusus, bila tidak mempunyai pancar ia hanya sebagai perhiasan biasa. Batu akik dan zambrut selain sebagai perhiasan ia juga berfungsi sebagai kekuatan sakti untuk mendapatkan rezeki, penolak bencana, pemanis bagi laki-laki atau perempuan yang memakainya.²⁷

2. Sistem upacara

Adat upacara tradisional dalam masyarakat Banjar ada bermacam-macam seperti :

a. *Manyanggar Banua*

Upacara ini dimaksudkan untuk membersihkan kampung dan tempat tinggal dari gangguan-gangguan makhluk ghaib. Upacara ini biasanya dilakukan menjelang akhir tahun, tetapi kadang pada waktu-waktu yang dianggap baik. Pemimpin upacara diambil dari seseorang yang cukup pengetahuannya tentang upacara tersebut. Pembuatan sesajen dilakukan oleh wanita-wanita tua yang sudah tidak datang haid lagi. Upacara ini dibuka dengan menyalakan perapen dengan dupa dan kemenyan, disertai bunyi gamelan. Alat-alat upacara terdiri dari mayang mengurai, sesajen, perapen dengan kayu gaharu, semuanya dipersembahkan oleh 7 orang puteri. Mayang mengurai yang baru dipetik digantung di tengah-tengah rumah dan diikat dengan tali, setelah itu upacara dimulai. Upacara ini diikuti oleh laki-laki dan perempuan yang berjalan mengelilingi sesajen dengan menyanyikan lagu dan *syair* masbangun, diiringi rebab dan rebana.²⁸

b. *Upacara Badudus*

Upacara Badudus adalah upacara mandi-mandi calon pangantin. Adat mandi-mandi Badudus ini hanya berlaku bagi bangsawan atau

²⁶Idwar, *Adat Istiadat*, *Op. cit.*, hal. 123.

²⁷*Ibid.*, hal. 124.

²⁸*Ibid.*, hal. 130.

keturunan raja. Acara ini dimaksudkan untuk pelindung bagi pengantin agar tidak terkena perbuatan orang yang berniat berbuat jahat.²⁹

Dalam upacara memandikan pengantin ini dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dalam jumlah ganjil, bisa 3 orang, 5 atau 7 orang dengan cara bergantian. Pada akhir upacara Badudus ini, pengantin dikelilingi dengan cermin dan lilin yang dibuat dari lebah. Cermin adalah sebagai simbol alat penolak dari perbuatan jahat orang lain dan akan kembali kepada orang yang memperbuatnya. Sedangkan lilin sebagai lambang penerang jalan bekal pengantin untuk menempuh kehidupannya.³⁰

c. *Upacara dalam Belajar Al-Qur'an*

Dalam masyarakat Banjar anak-anak sejak kecil sudah diajarkan membaca Al-Qur'an dan orang tua akan merasa malu jika anaknya tidak dapat membaca Al-Qur'an. Sebelum mengikuti pelajaran, anak-anak harus memenuhi persyaratan tertentu, dengan tujuan supaya anak cepat pandai membaca Al-Qur'an. Anak yang ingin belajar harus membawa nasi ketan yang diberi inti yang dibuat dari buah kelapa yang dihaluskan dan dimasak dicampur dengan gula merah. Hal ini dimaksudkan agar apa yang diajarkan oleh guru cepat melekat seperti nasi ketan itu.

3. *Sistem Pengetahuan*

Masyarakat Banjar memandang tubuh manusia dari dua dimensi, ia bukan hanya tubuh kasar yang tampak dilihat oleh mata, tetapi juga mempunyai arti yang bersifat batin. Tubuh manusia mengandung roh, rezeki dan nikmat. Dan dalam bagian-bagian tubuh manusia menurut kepercayaan masyarakat Banjar mempunyai arti khusus, seperti muka berisikan tuah, dada berisi kekuatan sebagai pengendali, tangan berisi kekuatan usaha dan kaki berisi kekuatan sebagai pelaksana.³¹

Masyarakat Banjar memandang bahwa waktu lebih banyak berkaitan dengan hal-hal yang bersifat keagamaan, usaha dan lain sebagainya. Bulan Maulud dan Mikraj Nabi adalah bulan yang baik untuk perkawinan, membangun rumah, melamar gadis dan sebagainya. Bulan Dzulkaidah merupakan bulan yang baik untuk mengeluarkan zakat, sehingga bulan ini oleh orang Banjar disebut sebagai bulan sugih atau bulan kekayaan.

²⁹Bondan, Suluh Sejarah, *Op. cit.*, hal. 157.

³⁰Akhmad Yunus, *Arti Perlambang dan Fungsi Tata Rias Pengantin dalam Menanamkan Nilai-nilai budaya daerah Kalimantan Selatan* (Jakarta : Depdikbud, 1984), hal. 111.

³¹Idwar, *Adat Istiadat*, *Op. cit.*, hal. 144.

E. Peran Serta Ulama

Sultan Suriansyah adalah raja pertama yang memeluk agama Islam dan menjadikan Islam sebagai agama resmi dalam kerajaan. Perhatian Sultan terhadap agama cukup besar, masjid tempat ibadah umat Islam pun dibangun.

Sebelum Sultan Tahmidullah II berkuasa hukum Islam belum melembaga dalam pemerintahan, karena pada masa itu belum ada ulama yang mendampinginya. Baru setelah Tahmidullah II berkuasa, terjadi perubahan dalam pemerintahan, terutama setelah Syekh Muhammad Al-Banjari datang dari Mekkah. Ia sangat disegani oleh Sultan karena ilmu agama beliau yang dalam. Maka beliau pun diangkat sebagai penasihat dalam sistem pemerintahan.

Ulama sebagai elite religius memberikan andil yang cukup besar bagi pemerintahan kerajaan. Sultan dan ulama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sultan dan ulama mempunyai kesatuan pandang dalam kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan dan menjunjung tinggi syariat Islam.

Hubungan baik antara ulama dengan Sultan terlihat jelas dalam kitab *Sabilal Muhtadin* yang ditulis atas permintaan Sultan yang berkuasa pada saat itu, untuk dijadikan pedoman hukum meski masih terbatas dalam bidang-bidang tertentu, seperti hukum waris dan pernikahan.

Dengan kebijakan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari secara perlahan-lahan hukum dan ajaran Islam dapat memasuki ruang istana. Dalam masyarakat Banjar ajaran fiqh dari madzhab Syafi'i sangat berpengaruh, sehingga menjadi hukum adat rakyat. Padahal sebelumnya sebahagian Sultan sangat terkenal memelihara berpuluh-puluh gundik yang merupakan kebanggaan Sultan, maka atas nasehat Syekh Muhammad Arsyad, Sultan menikah menurut aturan Islam.³²

Di kerajaan Banjar hukum had sempat pula diberlakukan kepada orang yang membunuh, murtad dan berzina sebagai pelaksanaan hukum syariat Islam.

Syekh Muhammad Arsyad menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan hukum Islam secara riil tidak mungkin tanpa adanya lembaga

³²Zafry Zamzam, "Dakwah Islam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari", *Gema Islam*, No. 29 Tahun 1963, hal. 16.

hukum yang mengatur dan melaksanakannya. Oleh karena itu, maka ia mengusulkan kepada Sultan untuk membentuk Mahkamah Syariah, yakni suatu lembaga pengadilan agama, yang dipimpin oleh seorang mufti sebagai ketua hakim tertinggi pengawas pengadilan umum. Lembaga ini bertugas mengurus masalah-masalah keagamaan yang timbul dalam masyarakat, agar senantiasa terbimbing kepada kebenaran hukum.

Mufti sebagai ketua Mahkamah Syariah juga didampingi oleh seorang qadhi yang berfungsi sebagai pelaksana hukum dan mengatur jalannya pengadilan.

Usul itu diterima oleh Sultan Tahmidullah II. Dengan demikian kepastian hukum yang diperkuat oleh Sultan dapat menyelesaikan perselisihan-perselisihan hukum yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan rasa keadilan.

IX KERAJAAN JAMBI

A. Latar Belakang Kerajaan Jambi

Pada abad XI, Jambi pernah menjadi pusat kerajaan maritim terbesar di Nusantara, yaitu maritim Sriwijaya-Hindu sebelum Islam masuk. Namun ketika pusat kerajaan dipindahkan, nama Jambi seakan-akan hilang dari catatan sejarah dan menyebabkan Jambi menjadi daerah yang kurang menguntungkan, tidak cuma itu wilayah inipun menderita ketidaksinambungan sejarah.¹

Proliferasi perdagangan di Indonesia bagian Barat selama abad XVI menimbulkan keuntungan tersendiri bagi Jambi karena menimbulkan kecenderungan ke arah konsentrasi di beberapa pusat, yaitu Aceh, Johor, Jambi, Palembang dan Banten.² Pada abad ini perdagangan lada mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Dan Jambi yang terletak di sekitar sungai Batanghari menjadi pelabuhan transit perdagangan lada.

Bagi Jambi lada yang dibawa dari Minangkabau menyusuri sungai Batanghari memang sangat berarti, tanpa lada Jambi bukanlah tempat yang berarti, karena Jambi tidak mempunyai apapun untuk ditawarkan ke dunia internasional.³ Ini terbukti ketika selama kurang lebih dua tahun

¹ Majalah Prisma II, 1984

² Sartono Kartodirdjo, Sejarah Indonesia, *Op. cit.*, hal. 109.

³ Prisma II, 1984

berturut-turut orang Minang tidak datang ke Jambi menyebabkan daerah ini sepi dari perdagangan.

Jambi — secara politik — pernah masuk pengaruh Mataram, inipun merupakan hal yang sangat menguntungkan bagi Jambi karena status ini berfungsi sebagai perisai terhadap ekspansi Banten yang sangat berpengaruh di Palembang.⁴ Karena Palembang masih menaruh perhatian kepada hubungan dengan Mataram.⁵ Disamping itu Jambi juga menghadapi ekspansi Johor dan Aceh. Untuk menghadapi ancaman yang tak kunjung reda itu, Jambi harus melindungi diri dengan persekutuan — yang selalu berubah-ubah — dengan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya.⁶

Dalam pemerintahan kerajaan Jambi terdapat keunikan tersendiri, karena adanya raja 'yang tua', yakni Sultan dan Raja 'yang muda', yakni Pangeran Ratu sebagai ahli waris tahta kesultanan yang selalu diambil dari anak Sultan yang terdahulu, masing-masing mereka memiliki daerah perlindungan dan pendukung di pedalaman dan mempunyai tanda kebesaran sendiri.⁷

Jaman keemasan dan kemunduran merupakan dua sisi dari masa berlangsungnya suatu kerajaan yang menjadi ajang perbandingan dalam kelancaran dan kesuksesan kepemimpinannya, ini bisa dilihat dari berbagai segi, baik segi : politik, ekonomi, sosial maupun budaya.

Kedatangan bangsa asing ke wilayah Nusantara memang mampu menyemarakkan kehidupan perdagangan di nusantara, namun kerugian yang diderita pun lebih banyak lagi. Bangsa-bangsa Eropa yang telah mengetahui wilayah Nusantara sebagai daerah yang menghasilkan komoditi yang laku keras di pasaran internasional (lada) datang ke Nusantara dan berusaha untuk menguasai perdagangan. Karena cita-cita yang tidak sehat inilah timbul reaksi-reaksi dari kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara dalam bentuk perlawanan menentang monopoli armada perdagangan Eropa itu walaupun akhirnya mereka kalah.

⁴Sartono kartodirdjo. *Op. cit.*, hal. 111.

⁵*Ibid.*, hal. 110.

⁶Prisma II, 1984

⁷*Ibid.*

B. Sistem Politiknya

Kesultanan Jambi, yang merupakan negara vassal Demak di awal abad XVI⁸ harus menghadapi kecenderungan sentrifugalnya secara terus menerus dalam sejarahnya. Pertama-tama kesultanan ini terdiri atas enam tradisi politik, bangsa VII-XII, masing-masing dengan tatanan politik dan kelembagaan yang berbeda. Hubungan mereka masing-masing dengan sultan di Ibu Negeri, juga berbeda. Jika kelompok XII, yakni kelompok etnis yang bermukim di sepanjang sungai Batanghari berada langsung di bawah kekuasaan Sultan, maka orang-orang batin yang dianggap paling awal datang ke Jambi dan menempati daerah sepanjang Batang Anai serta Batang Tembesi — hanyalah jajahan dari Sultan, walau orang batin agak bebas mengatur daerah mereka sendiri, mereka dikarenakan kewajiban membayar uang jajah, sebagai pengakuan terhadap kekuasaan Sultan, melalui instansi perwakilan Sultan yakni Jenang.⁹

Di bidang politik dalam negeri, dalam kerajaan Jambi dikenal dengan adanya dua orang penguasa, yaitu raja “yang tua” dan raja “yang muda”. Masing-masing kemudian dikenal sebagai Sultan dan Pangeran ratu (putra mahkota). Masing-masing mereka memiliki daerah pendukung di pedalaman dan mempunyai tanda kebesaran sendiri-sendiri. Namun demikian pemerintahan Jambi tidak terkesan otoriter dalam menerapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan terhadap rakyatnya. Sehingga amat kecil wibawanya di mata masyarakat, mekanisme kekuasaannya sangat lemah, yang paling berpengaruh adalah para orang kaya, saudagar dan hartawan. Tidak seperti Aceh dan Mataram pada abad XVII yang mampu menegakkan secara struktural kecenderungan otoritas Sultan-sultannya. Adanya dua orang raja juga dimaksudkan untuk kepentingan integritas kerajaan.

Di bidang politik luar negeri, untuk menjaga integritasnya, Jambi berusaha mengikat dirinya dengan sekutu yang selalu berubah-ubah — yakni kerajaan-kerajaan di sekitar itu. Ini disebabkan karena kelemahan institusi politiknya. Dan jika perlu, ia harus menguasai kemaharajaan negeri lain yang lebih kuat, untuk melindungi dirinya dari tetangganya yang agresif. Adapun sikap terhadap bangsa asing terutama bangsa Eropa, ia berusaha untuk menjalin hubungan sepanjang menguntungkan bagi dirinya.

⁸M.A.P. Meilink-Roelofs, *Asian Trade and European Influence* (Den Haag : Martinus Nijhoff, 1962), hal. 90-91.

⁹J. Tideman, *Djambi* (Amsterdam : Koninklijke vereeniging, “Kolonial Institute”, No. XIII, hal. 57-80.

C. Struktur Ekonominya

Suatu negara yang terletak di daerah pantai biasanya menggantungkan perekonomiannya di bidang perdagangan dengan keluar atau masuknya kapal ke negara tersebut, apalagi ditunjang dengan letak geografis yang menjadi jalur perdagangan internasional dan barang yang ditawarkan di pelabuhan itu. Maju mundurnya perekonomian negara itu dapat dilihat dari perkembangan perdagangan di pelabuhannya.

Secara geografis, Jambi terletak di pantai utara Sumatra di sekitar sungai Batanghari, yang merupakan jalur perdagangan yang penting.¹⁰ Jambi juga merupakan tempat penjualan merica yang dihasilkan petani pedalaman Minangkabau yang dipasarkan ke Jambi dengan menyusuri sungai Batanghari. Tanpa rempah-rempah dari Minangkabau ini, Jambi tak punya apapun untuk ditawarkan di pasar internasional.¹¹ Pada suatu masa selama dua tahun berturut-turut orang Minang dari hulu tidak datang, akibatnya Jambi tersingkir dari perdagangan merica. Itulah masa suram untuk dunia perdagangan mereka.

Saudagar-saudagar yang mayoritas para pendatang sangat besar pengaruhnya terhadap laju perekonomian negeri ini. Merekalah yang memberi izin perahu/kapal dagang yang boleh masuk atau keluar Jambi. Setiap tahun Jambi didatangi oleh 50-60 perahu Portugis, Inggris, Melayu dan perahu dagang dari Jawa. Ekspor rempah-rempah Jambi dikirim ke Jawa, dan sebaliknya dari Jawa negeri ini membeli beras, garam, sutra dan tekstil.¹²

Tahun 1615, Gubernur Jendral V.O.C. J.P. Coen mengirim dua kapal ke Jambi. Di bawah pimpinan Streck, Opperloopman atau kepala perwakilan dagang. Ia mendirikan kantor perwakilan dagang Belanda pada tanggal 15 September 1615. Ini adalah awal hancurnya perekonomian Jambi. VOC memaksa Jambi untuk mengakui kekuasaan Hindia Belanda dan melarang pedagang-pedagang asing masuk ke Jambi. Dan bentuk terakhir runtuhnya kesultanan Jambi adalah penghancuran kesultanan itu sendiri.

¹⁰Soury, W.Ph. Coolhaas, *Oud Nieuws Unt Djambi* (Leiden : t.p., 1950), hal. 71-82.

¹¹Schrieke, *Indonesia Sociological Studies*, vol. Denhaag (Bandung : W. van Hoeve, 1956), hal. 55.

¹²Prisma II, 1984

D. Reaksi Jambi Terhadap Kolonialisme Belanda

Pada tahun 1615, Gubernur Jenderal VOC, J.P. Coon mengirimkan dua kapal ke Jambi. Misi ini diperintahkan menyelidiki kesempatan perdagangan di kerajaan pantai tua ini.¹³

Pada tanggal 15 September 1615, perwakilan dagang Belanda pertama dibentuk di Jambi dan dipimpin oleh Streck. Dalam masa tugasnya yang pendek itu dia tidak hanya meyakinkan akan maksud-maksud baik kompeni, bahkan ia menghasut penguasa Jambi untuk menentang Inggris yang datang kemudian.¹⁴ Karena adanya peluang yang diberikan oleh penguasa Jambi, maka perlahan-lahan kehidupan politik Jambi pun mulai dijamah oleh Belanda, bahkan Belanda mampu mendominasi tatanan politik Jambi.

Salah satu wujud dominasi politik yang diterapkan oleh Hindia Belanda sebagai penjajah adalah campur tangan Belanda dalam pengangkatan raja-raja.¹⁵ Gejala yang demikian juga tampak di Jambi. Contohnya, sejak Sultan Raden Thoha Syaifuddin alias Pangeran Jayaningrat akan naik tahta, Belanda telah berupaya menghalang-halangnya, agar ia dapat menanamkan kekuasaannya di Jambi. Sikap yang demikian akhirnya ditentang oleh Sultan Thoha. Terdorong oleh sikap yang semena-semena itulah, sejak tahun 1855, Sultan Thoha bertekad untuk menentang kaum penjajah dan sebagai persiapan untuk langkah itu, dia menyingkir ke Hulu.

Kira-kira pada tahun 1895, pasukan dari Sultan Thoha mulai melakukan serangan terhadap benteng Belanda di Jambi, termasuk upaya untuk membunuh pegawai-pegawai Belanda.

Dalam tahap-tahap perjuangan terakhir, cucu Sultan Thoha, Muhammad Tahir yang terkenal dengan nama Raden Mahatir, masih berupaya melanjutkan perjuangan. Dan pada akhirnya iapun gugur pada tahun 1907.

E. Jaman Keemasannya

Dari setiap kerajaan pasti pernah mengalami masa kejayaan, demikian pula dengan kerajaan Jambi pernah mengalami kejayaan, yaitu

¹³*Ibid.*

¹⁴Hardi, *Menarik Pelajaran dari Sejarah* (Jakarta : CV Haji Masagung, 1988), hal. 59.

¹⁵*Ibid.*

pada saat Jambi diperintah oleh Sultan Thoha Syaifuddin.

Selain membangun kekuatan perekonomiannya, Sultan Thoha juga membuat rencana pengembangan pendidikan. Program pendidikannya bertujuan untuk meningkatkan pendidikan secara merata bagi rakyat. Rakyat dididik agar semakin maju dalam berfikir, dan diberantasnya buta huruf. Disamping meningkatkan pendidikan duniawi, dia juga menekankan pendidikan agama.

Sultan Thoha juga sangat memperhatikan masalah keadilan. Untuk menegakkan keadilan di setiap desa diangkat seorang hakim dan sang Qadhi (pemuka agama). Dengan demikian rasa aman rakyat menjadi terjamin.

F. Masa Kemundurannya

Dari setiap kerajaan pernah mengalami masa kejayaan. Kejayaan kerajaan Jambi adalah pada saat tampuk pemerintahan dipegang oleh Sultan Thoha Syaifuddin, yang sekaligus merupakan awal detik-detik kehancuran dan berakhirnya kesultanan Jambi.

Masa kemunduran Jambi mula-mula ditandai dengan penyerbuan Belanda ke Jambi pada bulan September 1858 yang kemudian menurunkan Sultan Thoha dari tahtanya. Pemaksaan Sultan Thoha untuk turun dari singgasananya bukan saja membinasakan kelanjutan tradisi kerajaan Jambi, tetapi juga melahirkan ketidakpastian bagi jalannya pemerintahan Jambi. Dengan penurunan Sultan Thoha itu, maka Ratu Martaningrat dan pembesar-pembesar kerajaan lainnya harus menandatangani perjanjian dengan Belanda. Perjanjian tersebut menegaskan kembali keabsahan beberapa perjanjian sebelumnya dan mengakui Jambi serta daerah-daerah yang pernah menjadi wilayah taklukannya sebagai bagian dari Hindia Belanda, yaitu selama tahun 1858-1881.¹⁶

Setelah kekuasaan Sultan Thoha berakhir, maka kerajaan dipegang oleh dua sultan, eksistensi kerajaan dengan dua sultan ini merupakan hal yang tidak diterima oleh anak-anaknya. Maka untuk mengakhiri keadaan yang tidak wajar ini, berbagai tindakan politik pun dilakukan. Tetapi dalam proses ini akhirnya Jambi pun jatuh dan kian jauh masuk ke bawah kekuasaan dan kontrol Belanda.

¹⁶Prisma II, 1984

Sebab kemunduran lain adalah dengan gagalnya golongan ningrat yang bermula dari pergantian Sultan Thoha. Secara urut tahun 1858-1881 pemerintahan dipegang oleh Sultan Ratu Achmad Nazaruddin, pada masa ini perjanjian yang dibuat tahun 1858 diperbaharui serta ditambah lagi, meliputi hak-hak ekonomi dan politik kedua belah pihak (kesultanan Jambi dan Hindia Belanda). Tahun 1881-1885 pemerintahan dipegang oleh Sultan Muhammad dan tahun 1886-1899 sebagai sultan adalah Achmad Nazaruddin.

Pada masa pemerintahan Sultan-sultan tersebut di atas keadaan pemerintahan semakin tidak menentu dan menampakkan kemunduran kerajaan Jambi.

4. Penerapan Istilah

Istilah *satri* dan *abangan* memang sangat khas di kalangan suku Jawa. Dalam kehidupan masyarakat Jawa ada suatu klasifikasi dan kelas-kelas sosial maupun kelas agama. Klasifikasi sosial masyarakat Jawa terdapat 4 kelompok, yaitu *adipati*, *priyayi*, *wong agung* atau *sandhangan* dan *wong cilik*. Sedang klasifikasi agama terdiri atas *satri* dan *abangan*. Kedua golongan ini (*satri* dan *abangan*) tidak berhubungan pada tingkat dimana kehidupan mereka terbelah agama Islam dan kehidupan seseorang dalam mengamalkan *surabaya* (*syari'at*).¹ Sebagai golongan ini dalam masyarakat Jawa dalam melakukan praktik religiusnya sangat berbeda-beda.

Satri adalah orang muslim shaleh yang memeluk agama Islam dengan sungguh-sungguh dan dengan total menjalankan perintah-perintah agama Islam, sambil berusaha membersihkan *agajah* dan *wong* yang terdapat di daerahnya.² Sedang *abangan* berarti berfikir artinya "yang merah". Istilah ini ditujukan kepada orang muslim Jawa yang tidak seberapa memperhatikan dan mengamalkan perintah-perintah agama la-

¹ *Calvin M. H. Houten, Satri and Abangan in Java*, (New York: Cornell Univ. Press, 1952), hal. 1.

² *Ibid.*

X

SANTRI DAN ABANGAN DI JAWA

A. Penegasan Istilah

Istilah santri dan abangan memang sangat khas di kalangan suku Jawa. Dalam kehidupan masyarakat Jawa ada suatu klasifikasi atau kelas, baik kelas sosial maupun kelas religius. Klasifikasi sosial masyarakat Jawa terdapat 4 kelompok, yaitu ndara, priyayi, wong dagang atau saudagar dan wong cilik. Sedang klasifikasi religius terdiri atas santri dan abangan. Kedua golongan ini (santri dan abangan) letak perbedaannya pada sampai dimana kebaktian mereka terhadap agama Islam atau ukuran kepatuhan seseorang dalam mengamalkan *sarengat* (syari'at).¹ Sehingga golongan ini dalam masyarakat Jawa dalam melakukan tindak religiusnya sangat berbeda sekali.

Santri adalah orang muslim sholeh yang memeluk agama Islam dengan sungguh-sungguh dan dengan teliti menjalankan perintah-perintah agama Islam, sambil berusaha membersihkan aqidah dari syirik yang terdapat di daerahnya.² Sedang abangan secara harfiah artinya "yang merah". Istilah ini ditujukan kepada orang muslim Jawa yang tidak seberapa memperhatikan dan mengamalkan perintah-perintah agama Is-

¹ Zaini Muchtarom, *Santri and Abangan in Java*, terj. Sukarsi (Jakarta : INIS, 1988), hal. 5.

² *Ibid.*

lam dan kurang teliti dalam memenuhi perintah-perintah agama.³ Jadi abangan bisa dikatakan seorang penganut agama Islam tetapi disamping menjalankan syari'at juga masih menjalankan ajaran atau unsur-unsur kepercayaan pra-Islam, Hindu-Budha, sehingga istilah abangan sering juga dinamakan agama Jawa.

Jadi antara santri dan abangan dibedakan dalam hal sejauh mana mereka memegang kepercayaan agama Islam. Abangan cenderung lebih sinkritis dan santri cenderung lebih Islam yang puritan.⁴ Jadi ukuran kereligiusannya itu tentu saja tergantung pada nilai-nilai pribadi masing-masing orang yang menggunakan istilah-istilah tersebut. Pengertian santri dan abangan dalam hal ini, dapat dianggap sebagai dua subkultur, berpandangan dunia, bernilai dan berhaluan yang berbeda-beda di dalam kebudayaan Jawa.

Kata santri merupakan perubahan kata India "shastri" yang berarti orang yang tahu kitab-kitab suci.⁵ Istilah lain untuk kata santri, sebagaimana lazim digunakan oleh orang Jawa ialah kata 'putihan'.⁶ Istilah ini muncul karena pada saat menjalankan ibadah (sholat) biasanya santri ini memakai pakaian serba putih.

Dalam perkembangan selanjutnya ada sebuah desa yang disebut dengan "Desa Putihan" atau desa Mutihan. Di mana desa tersebut didiami oleh mayoritas masyarakat yang tergolong dalam klasifikasi kaum santri. Sedangkan sebutan untuk kota yang demikian (permukiman di sekitar masjid) biasanya disebut kauman.

Itulah pengertian dari istilah santri dan abangan yang sebenarnya dibedakan pada kepatuhan menjalankan agama.

B. Asal Usul Santri dan Abangan

Asal usul sebutan santri dan abangan ini tidak terlepas dari penyebaran agama Islam di Indonesia dan Jawa khususnya. Yang dalam hal ini para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai kapan masuknya Islam ke Indonesia. Ada segolongan yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, ada yang abad ke-11 dan ada yang mengatakan masuk abad ke-13, yang masing-masing mempunyai alasan yang

³Ibid., hal. 6.

⁴Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1984), hal. 310.

⁵Zini Muchtarom. *Loc. cit.*

⁶Ibid.

kuat. Yang jelas Islam masuk ke Pulau Jawa dibawa oleh saudagar-saudagar dari Gujarat. Jadi Islam masuk bertalian erat dengan perdagangan.

Sementara itu Islam datang dengan menawarkan persamaan-persamaan, tidak seketat ajaran yang terdapat pada agama Hindu maupun Budha. Lebih-lebih Islam yang masuk ke Jawa berasal dari Persia dan India yang sudah bersifat Islam tasawuf.⁷ Islam corak ini cocok sekali dengan orang Jawa, yang sudah terbiasa dengan kehidupan mistik. Di sisi lain, yang tidak kalah pentingnya dalam penyebaran Islam yang dilakukan oleh para Syahbandar (penguasa Pelabuhan).⁸ Yang pada waktu itu dipegang oleh orang asing yang muslim, malah dapat menyebarkan Islam baik kepada rakyat biasa maupun kepada keluarga raja, karena mereka sering dijadikan sebagai penasehat dalam hal perdagangan dengan negara lain. Dengan demikian ada kontak langsung dengan raja.

Tak kalah pentingnya adalah peranan Wali Sanga dalam penyebaran agama, mereka sangat besar peranannya dalam proses Islamisasi di Jawa. Disamping para wali itu akrab dengan rakyat bawah, mereka juga menjalin hubungan dengan para Bangsawan. Raden Patah adalah salah satu bangsawan yang dekat dengan wali sehingga proses Islamisasi yang dilakukan mengalami kemudahan. Lebih-lebih pada tahun 1520 M (abad ke-16) kerajaan Majapahit runtuh, hal ini lebih mempermudah dan memperlancar perluasan Islam. Setelah kekuasaan Bintara mapan, maka para saudagar diberi hak mendirikan masjid,⁹ sekaligus dengan pesantrennya.

Hal lain yang menarik dari pesantren adalah banyak mandala (tempat pendidikan) pada zaman Hindu yang berada di daerah pedesaan diubah oleh para wali menjadi komunikasi pondok pesantren.¹⁰

Dengan begitu penyebaran Islam di kalangan atas dan kalangan bawah terkena semuanya. Akan tetapi penyebaran Islam ini diwarnai oleh kebudayaan Jawa, karena kaum bangsawan maupun rakyat awam masih berpegang teguh pada adat Jawa (Hindu) dengan demikian dakwah Islam dilakukan dengan meletakkan kebiasaan-kebiasaan setempat yang tidak bertentangan dengan aqidah. Sebelum Raden Patah menjadi Raja,

⁷Ibid., hal. 18.

⁸Ibid., hal. 19.

⁹Koentjaraningrat, *Op.cit.*, hal. 122.

¹⁰Ibid., hal. 316.

ia diberi kelonggaran untuk mendirikan Pesantren oleh Prabu Brawijaya, maka ia pun mendirikan Bayangkare Islah (Pengawal usaha perbaikan) yang salah satu programnya adalah : guna memadamkan penyebaran agama Islam, hendaklah diusahakan agar Islam dan tradisi Jawa didamaikan satu dengan lainnya.¹¹ Dengan demikian banyak bangsawan dan rakyat yang muslim tetapi masih menjalankan ajaran Jawa yang kemudian muncul istilah santri dan abangan. Pada masa pendudukan Belanda pangreh praja akan dicurigai bila mereka tekun menjalankan agamanya, karena khawatir akan populer di kalangan rakyat sehingga Belanda membuat semacam proses abangisasi di kalangan priyayi sejak abad ke-19.¹² Dikarenakan ada semacam Islamophobia di kalangan Belanda proses ini diperkuat lagi dengan mendirikan sekolah model Barat.

Istilah santri kadang disebut juga dengan istilah putihan, namun santri lebih populer. Dan sebutan santri ini digunakan untuk siswa yang belajar agama Islam di pesantren, sedang abangan tidak bisa disebut antitesa terhadap santri. Walaupun kebanyakan mereka tidak menjalankan rukun Islam secara sempurna, misalnya mereka tidak menjalankan ibadah sholat, tidak terlalu mementingkan pantangan makan daging bagi, tidak berminat untuk menunaikan ibadah haji, akan tetapi banyak diantara mereka yang taat berpuasa di bulan Ramadhan.

Meski demikian bukan berarti bahwa mereka (abangan) tidak beragama atau sedikit memikirkan agama, atau tanpa agama, sebab sebenarnya agama justru banyak menyita waktu mereka.¹³ Kemunculan dua golongan ini merupakan hasil perkembangan berangsur-angsur pengaruh latar belakang sosial serta proses berkesinambungan pada deferensiasi dalam peradaban Jawa. Juga latar belakang kebudayaan dalam arti hubungan-hubungan manusia dengan lingkungannya serta pranata yang menjalankan hubungan tersebut.

C. Praktek Keagamaan Santri dan Abangan

Santri dan abangan walaupun ada salah satu unsur kesamaan, yaitu sama-sama Islam, namun cara mereka menjalankan praktek keagamaannya berbeda, sesuai dengan pengaruh dan pranata yang ada dalam

¹¹Zaini Mochtarom, *Op. cit.*, hal. 29.

¹²Sartono Kartodirdjo, dkk., *Perkembangan Peradaban Priyayi* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1987), hal. 60.

¹³Koentjaraningrat, *Op. cit.*, hal. 311.

keyakinannya. Santri berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan agama secara benar serta berusaha menjauhkan diri dari perbuatan syirik, sedangkan kaum abangan walaupun mereka juga Islam, namun dalam hal praktek keagamaan mereka masih diwarnai unsur kejawen, sehingga mereka mencampur adukkan antara upacara-upacara Islam dengan upacara-upacara kejawen.

Orang abangan juga percaya adanya Allah SWT, Rasul dan menganggap Al-Qur'an sebagai sumber utama dari segala pengetahuan,¹⁴ tetapi mereka juga percaya kepada roh-roh dewa-dewa yang berada di suatu tempat tertentu. Konsep Tuhan bagi kaum abangan terdapat dalam buku Nawaruci pada abad ke-17 dalam bahasa Bali-Jawa dalam bentuk Prosa. Dan Tuhan dilambangkan sebagai makhluk kecil dan dapat melihat isi jagad raya. Kepada dewa mereka sangat menghormati, terutama kepada dewa kesuburan dan Dewi Padi (Dewi Sri), dan Bathara Kala.

Pada bulan Suro keris-keris perlu dirawat dan dibersihkan.¹⁵ Pada hari Selasa Kliwon dan Jum'at Kliwon di depan sebuah "tilam hias" (sebuah ruangan khusus untuk para nenek moyang yang sudah mati, rohnya akan menjadi lelembut yang berkeliaran, kemudian keluarganya mengadakan selamatan agar roh dapat pergi ke alamnya). Bila di dunia ia berkelakuan jelek, maka roh mereka akan berkeliaran dan mengganggu manusia. Kepada roh kaum abangan juga ada yang meminta keselamatan seperti kepada dhanyang, sing baturekso. Juga mereka meminta pertolongan seperti kepada thuyul, pepunden. Sedangkan kepada roh jahat mereka tidak suka dan sering menyebutnya dengan memedi.¹⁶ Orang Jawa mengenal bermacam-macam syetan, ada syetan dharat, syetan bisu, syetan mbelis, mereka berjenis kelamin pria sedangkan wewe berjenis kelamin wanita. Disamping itu mereka juga percaya adanya sundhel bolong, banaspati, Nyi Blorong, macan gadungan dan lain-lain.

Upacara keagamaan yang dilakukan oleh orang Jawa ada yang dinamakan dengan slametan yaitu makan bersama dengan kelengkapan nasi tumpeng, lauk pauk, ayam, air kendi, air kembang, kemudian setelah mereka semua hadir, modin memimpin doa yang kemudian dilanjutkan dengan dzikir membaca Lailahaillallah.¹⁷

¹⁴*Ibid.*, hal. 311.

¹⁵Sartono Kartodirdjo, *Op. cit.*, hal. 75.

¹⁶Koentjaraningrat, *Op. cit.*, hal. 339.

¹⁷*Ibid.*, hal. 346.

Upacara lain ialah tingkepan, merupakan upacara tujuh bulan (mitoni) ketika bayi masih dalam kandungan ibu. Setelah bayi lahir dan dipotong tali pusatnya dengan welat, lalu diadakan upacara puput puser setelah tali pusat terlepas. Upacara-upacara lain masih banyak seperti: upacara memberi nama, kekahan (potong rambut), tedak siten (upacara menyentuh tanah), khitanan dan lain-lain.

Praktek keagamaan bagi kaum santri lain lagi, keyakinannya kepada Allah adalah dengan jalan mengesakan-Nya serta mengakui ke-Maha-an Tuhan Allah. Tuhan tidak digambarkan seperti apapun. Kepada selain Nabi Muhammad juga percaya, pokoknya rukun Islam dan rukun iman mereka jalankan. Kematian bagi kaum santri merupakan hal biasa yang disebabkan oleh hilangnya nyawa oleh malaikat Izroil, kerana sudah waktunya dan roh tetap berada dalam kubur hingga hari kiamat. Sistem keyakinan agama Islam diatur dalam syari'at, dengan sumber hukum Al-Qur'an dan Hadits.

Sistem upacara keagamaan kaum santri banyak macamnya diantaranya adalah : sholat lima waktu sehari semalam, membayar zakat fitrah atau mal bagi yang mampu yang diberikan kepada fakir miskin, menunaikan haji, kurban, bershodaqoh, amar ma'ruf dan nahi munkar dan lain-lain. Begitu juga santri mengenal perayaan tahunan dan menjalankan peringatan-peringatan lain, seperti : peringatan Maulid Nabi Muhammad saw, 1 Syawal, 10 Besar, Isro' Mi'roj yang didalamnya diisi dengan pengajian-pengajian (ceramah-ceramah), baca Al-Qur'an dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Yunus, *Arti Perlambang dan Fungsi Tata Rias Pengantin Dalam Menanamkan Nilai-nilai Budaya Daerah Kalimantan Selatan*, Jakarta, Depdikbud, 1984

Alfian (ed.), *Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan*, Jakarta, Grafiti, 1988

Amir Hasan Ali Bondan, *Suluh Sejarah Kalimantan*, Banjarmasin, MAI Fajar, 1953

"Benteng Ujung Pandang", Jakarta, Depdikbud, 1985

Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta, PT. Cipta Adi Pustaka, 1990

Gadjannanta K.HO. Sri Edi Swasono, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatra Utara*, Jakarta, UI Press, 1986

Gazali Usman, *Sistem Politik dan Pemerintahan dalam Perjalanan Sejarah Masyarakat Banjar*, Seminar 1985

Hardi, *Menarik Pelajaran dari Sejarah*, Jakarta, CV. Haji Masagung, 1988.

Hassan Muarif Ambang, dkk., *Sejarah Banten dari Masa ke Masa*, Serang, t.p., 1988

Hassan Yusuf, *Gelora Kalimantan Selatan dalam Madya Abad XIV*, Yogyakarta, Persatuan, 1982

Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1981

H.J. De Graaf, *Puncak Kekuasaan Mataram (Politik Ekspansi Sultan Agung)*, terj. Grafiti Pers & KITLV, Jakarta, Grafiti Pers, 1986

-----, dan TH.G.TH. Pegeaud, *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa*, terj. Grafiti Pers & KITLV, Jakarta, Grafiti Pers, 1986

Idwar Saleh, *Banjarmasin*, Jakarta, Depdikbud, 1982.

-----, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, Jakarta, Depdikbud, 1977

-----, *Adat Istiadat Daerah Kalimantan Selatan*, Jakarta, Depdikbud, 1977

J. Tideman, *Djambi* (Amsterdam, Koninklijke Vereeniging, "Kolonial Institute", No. XLII

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta, Balai Pustaka, 1984

Leirissa, Sejarah Sosial Daerah Kalimantan, Jakarta, Depdikbud, 1984

M.A.P. Meilink-Roelofsz, *Asian Trade and European Influence*, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1962

M. Yahya Harun, *Sejarah Masuknya Islam di Indonesia*, Yogyakarta, t.p., 1986

-----, *Sejarah Islam Indonesia*, Yogyakarta, Bina Usaha, 1986

"Prisma" II, 1984

Sartono Kartodirdjo, dkk., *Sejarah Nasional Indonesia*, Jakarta, Depdikbud, 1975

-----, *Perkembangan Peradaban Priyayi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1987

-----, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jakarta, Depdikbud, 1975

-----, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900 Dari Emperium sampai Imperium*, Jakarta, PT. Gramedia, 1992

Sass J.J., *Hikayat Banjar : A Study in Malay Historiography*, Leiden, Glossary, 1968

Schrieke, *Indonesia Sociological Studies*, vol. Den Haag, Bandung, W. van Hoeve, 1956

Sourry, W. Ph. Coolhaas, *Oud Nieuws Unt Djambi*, Leiden, t.p. 1950

Syaifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung, Al-Ma'arif, 1981

Zaini Muchtarom, *Santri and Abangan in Java*, terj. Sukarsi, Jakarta, INIS, 1988

26411995

